



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS



**MIRWAN KARNI
07202022**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Oleh : Mirwan Karni

(Di bawah bimbingan Dr. Erwin, M.Si dan Prof.Dr.Afrizal,MA)

RINGKASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD meliputi hak prakarsa atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penelitian ini mengungkapkan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan peraturan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yaitu Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Pimpinan Parpol, Eksekutif dan LSM. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara dengan informan dan teknik pengumpulan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD dalam penyusunan peraturan daerah terbagi dua faktor eksternal dan internal. Yang termasuk kedalam faktor eksternal adalah tidak adanya desakan dari partai politik kepada anggotanya yang duduk di parlemen dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah, kelompok – kelompok penekan seperti MUI, Forum Nelayan dan LSM yang lebih banyak menekan eksekutif daripada legislatif melalui Unjuk rasa, dan perumusan rancangan peraturan daerah yang selalu dilakukan oleh eksekutif sedangkan yang termasuk kedalam faktor internal yaitu persepsi anggota dewan mengenai peran DPRD dalam berinisiatif menyusun rancangan peraturan daerah.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

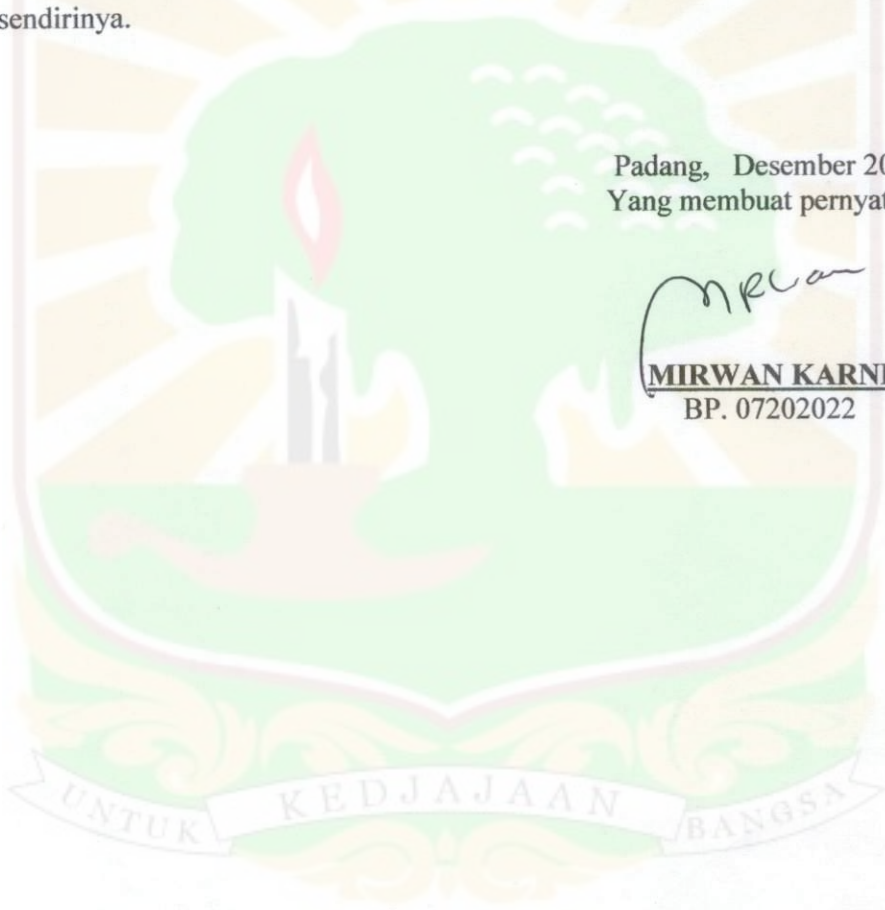
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang ditulis dengan judul :

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Adalah hasil kerja / karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka status kelulusan saya akan batal dengan sendirinya.

Padang, Desember 2009
Yang membuat pernyataan


MIRWAN KARNI
BP. 07202022



Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan
apa yang orang bodoh akan mengerjakannya
tiga hari kemudian
(Abdullah Ibnu Mubarak)

Dengan segenap rasa syukur kehadirat
Allah SWT ku persembahkan karya
sederhana ini kepada Ibunda dan
Ayahanda yang kucintai dan
kubanggakan, do'a dan pengorbanannya
senantiasa mengalir tak pernah putus
untukku,

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1982 di Padang, sebagai anak kelima dari Ayah Drs Karema Bakman dan Ibu Erfani. Penulis menamatkan SD pada tahun 1994, SMP tahun 1997 dan SMA pada tahun 2000 di Lubuk Alung. Penulis memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2005.

Sejak Tahun 2005 sampai sekarang penulis ditugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tahun 2007 memperoleh kesempatan meneruskan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas di Padang.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman”.

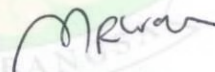
Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin, M.Si sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Afrizal, MA sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingannya selama penelitian dan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Asmawi, MS selaku ketua Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah yang telah memfasilitasi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ibadah kita dan selalu memberi petunjuk kepada kita semua. Amien.

Padang, November 2009

Penulis


MIRWAN KARNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Fungsi.....	8
2.2 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9
2.3 Pengertian Peraturan Daerah	14
2.4 Otonomi Daerah Demokrasi Lokal	17
2.5 Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif.....	22
2.6 Penyebab Kinerja Legislatif	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Teknik Analisis Data	34
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Padang Pariaman	37
4.1.1 Keadaan Geografi	37
4.1.2 Keadaan Demografis.....	39
4.1.3 Keadaan Sosial Politik	40
4.1.4 Keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman	41

4.1.5 Tugas, wewenang, hak dan kewajiban.....	44
4.1.6 Alat Kelengkapan DPRD	50
4.1.7 Fraksi DPRD Kabupaten Padang Pariaman	54
4.2 Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah.....	56
4.3 Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD	68
4.4 Faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88



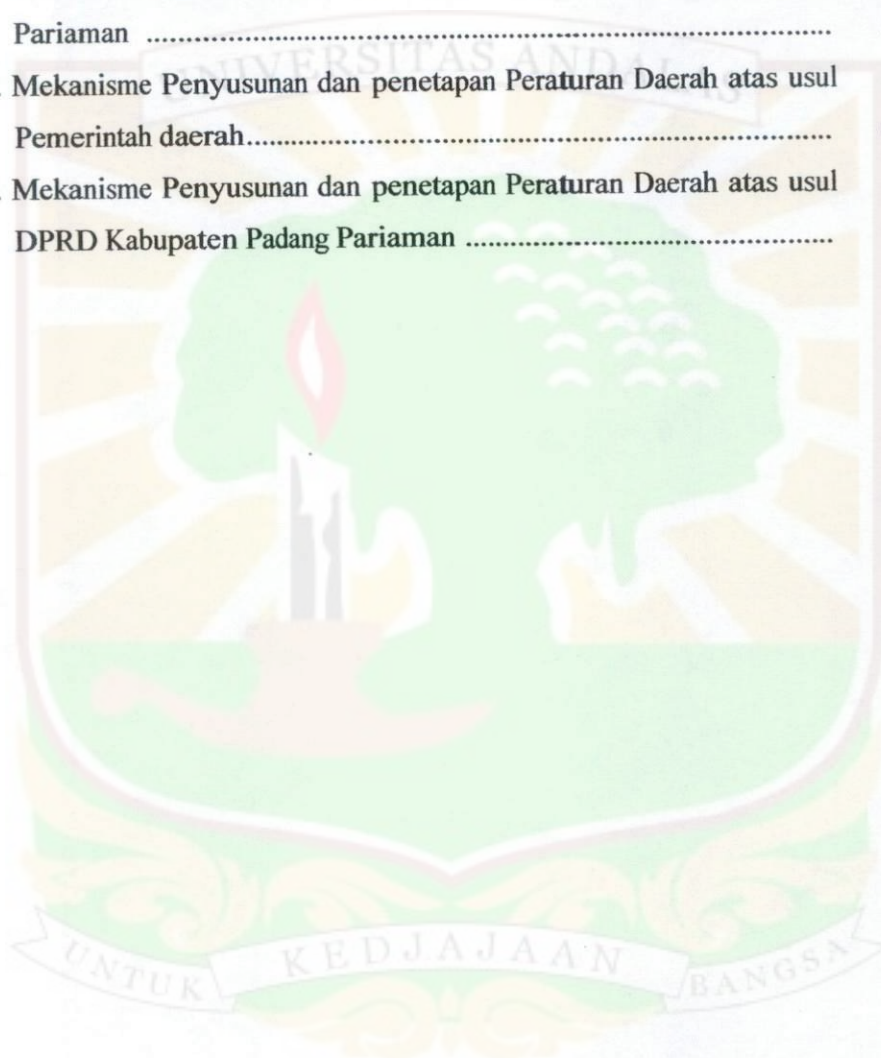
DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tesis	36
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan jenis kelamin Tahun 2006 – 2008	39
3. Jumlah Perolehan kursi Partai Politik DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2004 – 2009	42
4. Keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan klarifikasi pendidikan formal Periode 2004 – 2009.....	43
5. Jumlah dan asal usul Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	69



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Skematik Proses Legislatif.....	29
2. Model Analisis Interaktif	35
3 Struktur Organisasi dan Tata kerja DPRD Kabupaten Padang Pariaman	51
4. Mekanisme Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah atas usul Pemerintah daerah.....	60
5. Mekanisme Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah atas usul DPRD Kabupaten Padang Pariaman	63



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksekutif sangat dominan terhadap Legislatif pada zaman Orde Baru, dimana Pemerintah Daerah yang berkuasa mengawasi dan mengukur rakyat. Kepala Daerah merangkap Kepala Wilayah sering dengan sebutan penguasa tunggal (Wakil Pemerintah Pusat di Daerah). Kepala daerah membina dan mengawasi langsung partai politik, organisasi masyarakat dan mengawasi kinerja DPRD. DPRD praktis tidak berfungsi sebagaimana mestinya baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pengawas. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, secara struktural tidak bisa berbuat apa-apa (seperti hak angket tidak dapat dipergunakan karena belum diatur dengan Undang-Undang dan harus mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Depdagri). Para anggota DPRD harus patuh terhadap petunjuk pimpinan partai dari pada konsekuensinya. Partai diawasi dan dibina oleh Eksekutif, karena sarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD dikendalikan oleh Kepala Daerah (Surbakti, 1999).

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat kuat dan strategis bila dibandingkan kedudukan DPRD periode sebelumnya. Hal ini disebabkan parlemen masa Orde Baru yang hanya sebagai “tukang stempel” terhadap

kebijakan pemerintah, parlemen era reformasi relatif lebih memiliki kekuatan politik (AM Fatwa, 2; 2004).

Arus reformasi yang sedang marak di Indonesia telah berpengaruh terhadap kedudukan lembaga Legislatif dan Eksekutif. Reformasi politik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah yang selama ini berlangsung dengan cara-cara Orde Baru.

Adanya perubahan sistem Pemerintahan Daerah, perubahan lingkungan internal DPRD dengan berlakunya sistem multipartai dan perubahan lingkungan masyarakat, DPRD perlu mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan fungsi dan peranannya. Dalam mengoptimalkan fungsi dan peranan DPRD sebagai penyambung lidah rakyat pada kenyataannya belum dapat diwujudkan. Hal ini terkait dengan faktor baik dari dalam atau pun dari luar DPRD itu sendiri.

Menurut Malarangeng (122; 2001) DPRD harus mempunyai kemampuan untuk mengimbangi dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, diperlukan upaya secara proporsional antara DPRD dengan Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yakni DPRD dipisahkan dengan pemerintah daerah dengan maksud lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah pada rakyat, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah.

Kedudukan yang sangat penting tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsinya baik sebagai penyalur aspirasi rakyat, maupun dalam fungsi

kemitraannya dengan Pemerintah Daerah baik dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembuatan Peraturan Daerah maupun penetapan kebijakan yang menyangkut pelayanan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Hal ini selaras dengan proses pengajuan rancangan Undang-undang di tingkat pusat. Pasal 5 ayat 1 amandemen Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

Pelaksanaan dari fungsi Legislasi adalah kewenangan DPRD menggunakan hak inisiatif atau prakarsa dan hak amandemen atau hak untuk mengadakan perubahan. Dengan dijalankannya fungsi legislasi oleh DPRD, maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah akan menggambarkan tentang kehendak atau aspirasi masyarakat.

Konsekuensi logis dari menguatnya peran DPRD adalah munculnya keberanian dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui wakil-wakilnya di DPRD. Di sini jelas bahwa optimalisasi kinerja DPRD sangat dibutuhkan untuk dapat menjawab aspirasi masyarakat.

Menyertai pelaksanaan otonomi daerah memang telah terjadi dinamika politik daerah yang disebabkan karena perbedaan visi dan persepsi antar berbagai pihak tentang hakekat dan makna otonomi daerah sehingga tidak jarang terjadi salah konsep antar pihak yang berdampak luas terhadap kehidupan lokal. Tidak terkecuali DPRD, penilaian positif maupun negatif tentang peranan dan kinerja DPRD seolah menjadi jawaban atas kesalahan konsep pelaksanaan otonomi

daerah. Tetapi dibalik itu semua pada hakekatnya dalam masa-masa transisi seperti sekarang, DPRD sangat memerlukan penilaian dari berbagai elemen yang ada tentang kinerja yang mereka lakukan.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah sekaligus sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini membuktikan pentingnya posisi kesejajaran antara DPRD dengan Pemerintah daerah, bersama-sama memikul tugas dan tanggung jawab untuk memajukan daerah yang bersangkutan.

Fungsi DPRD mengacu pada pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dikemukakan Imawan (2000:8) bahwa sebagai institusi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi legislasi (perundangan) meliputi pembuatan aturan sendiri, menentukan pucuk pimpinan Eksekutif secara mandiri, serta menjadi mediator kepentingan rakyat dan pemerintah.
2. Fungsi budget (penganggaran) meliputi merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan.
3. Fungsi pengawasan, meliputi aktivitas memfasilitasi perkembangan kepentingan dalam masyarakat vis-à-vis agenda yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan masih selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan aspirasi masih bisa diakomodir dalam rencana kerja pemerintah.

Fungsi DPRD sebagaimana disebutkan di atas, telah berlaku secara nasional sejak tanggal 1 Januari 2001 yang lalu secara serentak dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah untuk semua daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia termasuk DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu fungsi utama DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga legislatif daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang sekaligus sebagai inti pembahasan penelitian. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Padang Pariaman belum terlaksana seperti yang diharapkan.

Eksistensi Legislasi yang diartikan sebagai pembentukan peraturan perundang – undangan, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan salah satu fungsi parlemen. Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Padang Pariaman sudah dapat menunjukkan karakter dan kualitasnya baik secara material maupun secara fungsional, karena kadar Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD menjadi barometer kualitas kemampuannya dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya. (Am Fatwa, 95;2004)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22/KPTS/DPRD-PP/2004 telah mengatur hak inisiatif atau prakarsa DPRD dalam melakukan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah atas usulan dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif daerah, idealnya DPRD dapat menjadi sumber inisiatif, ide, dan konsep mengenai Rancangan Peraturan Daerah. Tetapi kenyataannya selama ini DPRD kurang optimal dalam melaksanakan fungsi

perundang-undangan yang meliputi hak prakarsa atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Prakarsa DPRD begitu minim sehingga DPRD terkesan kurang berfungsi dan tidak memiliki kekuatan dihadapan eksekutif. DPRD juga memberikan kesan ragu-ragu dalam menggunakan hak amandemen.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan usulan DPRD sangat sedikit ? Pertanyaan ini akan dijawab dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut :

- a. Apakah ada Faktor – faktor eksternal DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah seperti : Kepentingan pemilih, Input output eksekutif dan lain – lain
- b. Apakah ada faktor – faktor internal dalam penyusunan Peraturan Daerah seperti : SDM, dan lain – lain

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan penyebab – penyebab rendahnya inisiatif DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya menyangkut konsep-konsep pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Fungsi

Pengertian Fungsi menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1991:735) yaitu :

1. Jabatan (yang dilakukan) pekerjaan yang dilakukan misalnya, jika Ketua tidak ada maka Wakil Ketua melakukan pekerjaan Ketua
2. Kerja bagian tubuh, misalnya jantung
3. Kebebasan (quantity) yang berhubungan dan jika kebebasan yang satu berubah maka kebebasan yang lain pun berubah juga

Pengertian lain menurut Prajudi (1987:53) "fungsi adalah apa atau sesuatu yang harus dilakukan/dijalankan guna memenuhi maksud atau tujuan". Sedangkan Musanef (1990:87) mengatakan bahwa "Fungsi adalah suatu yang harus dijalankan dan merupakan suatu aktifitas sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu"

Lebih lanjut Budiharjo (1993:182) menyatakan bahwa fungsi badan Legislatif Daerah ada dua yaitu :

1. Menentukan Policy (kebijaksanaan) dan membuat Undang-undang, untuk itu DPRD diberi hak legislatif hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh Pemerintah dan hak Budget
2. Mengontrol badan Eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan Eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi adalah memberikan suatu gambaran dalam pelaksanaan suatu tugas yang diemban oleh suatu organisasi tentang bagaimana menjalankan fungsi-fungsi yang ada, sehingga tampak jelas bagaimana posisi-posisi yang ada dalam wadah organisasi itu membuat perencanaan yang dapat memberikan hasil-hasil yang optimal dan akurat bagi yang melaksanakan fungsi tersebut.

2.2 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

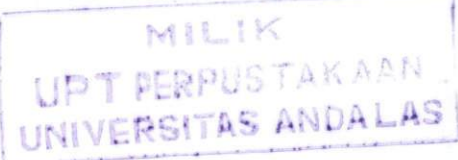
Poerwadarminta (1991: 797) menjelaskan bahwa "Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa anggota dimana pekerjaan memberi nasehat, memutuskan sesuatu dengan jalan berunding".

Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa esensi dari Dewan itu sendiri adalah badan dengan anggota lebih dari satu orang dengan tugas-tugas selaku penasihat pengambil keputusan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah.

Poerwadarminta (1991:800) menjelaskan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil rakyat di daerah, atau badan legislatif tempat wakil rakyat menetapkan undang-undang di tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten"

Menurut Kencana (2002:45)

"Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan yang di Indonesia disebut dengan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) untuk tingkat pusat, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk tingkat daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Setiap anggota DPR harus bergabung dalam salah satu fraksi yang dibentuk oleh DPR. Fraksi dibentuk bertugas untuk meningkatkan kemampuan yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR"



Selanjutnya menurut Marbun (1994, 129) DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Menurut Syafrudin (2001:1) bahwa kedudukan, susunan, tugas dan wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-undang. Masih menurut Syafrudin (2001:3) bahwa substansi dari DPRD adalah :

1. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah
3. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi dan panitia-panitia
5. DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD
6. Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan butir 5 diatur dengan tata tertib DPRD

Menurut Terry (1991:92) bahwa, "pembagian tugas menjurus kepada pembentukan bagian. Pembentukan tentang pembagian tugas menyebutnya sebagai: (a) dari atas ke bawah, (b) dari bawah ke atas, (c) lintas pekerjaan".

Masih menurut Terry (1991:100) bahwa "pengertian penting dari wewenang adalah tanggung jawab yang menjadi kewajiban setiap individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terbaik dari kemampuan yang dimilikinya".

Adapun kedudukan DPRD adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, selain itu juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian kedudukan DPRD semakin kuat karena berwenang mengawasi pemerintahan daerah dan ikut menentukan arah pembangunan daerah. Peran legislatif terutama dalam legislasi diwujudkan melalui tugas dan wewenang DPRD membentuk peraturan daerah.

Hendry B Mayo dalam *An Introduction To Democratic Theory* (1960:70) menyatakan :

"A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basic, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom"

Dikaitkan dengan pernyataan tersebut maka DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya terdiri dari partai politik hasil pemilu seharusnya konsisten terhadap hal-hal yang pernah dijanjikan kepada rakyat sebelum mereka terpilih jadi wakil rakyat. DPRD juga seharusnya mampu melaksanakan tugas dan perannya secara baik dan optimal.

Keberadaan DPRD sebagai penjelmaan rakyat di daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi. Keberadaan DPRD di daerah diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang berlandaskan asas demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat.

Menurut International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah *"A form of government where the citizens exercise the same right (the right to make political decisions) but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free elections"*.

Perkembangan tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat masyarakat semakin kritis dalam menilai berbagai fenomena yang terjadi, termasuk fenomena-fenomena yang ada ditubuh DPRD. Pelaksanaan peranan DPRD secara baik dan optimal adalah tuntutan wajar dari masyarakat.

Penyusunan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari fungsi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat serta menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pelaksanaan hak inisiatif DPRD secara optimal pada proses penyusunan perda sangatlah penting.

Paradigma baru pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan DPRD terpisah dari pemerintah daerah, menunjang pelaksanaan fungsi DPRD secara optimal. Akan tetapi itu saja belum cukup.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, mutu dan kualitas DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijaksanaan daerah yang tepat sangat tergantung dari pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi rakyat yang diwakilinya. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Pendidikan sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan yang luas dan dalam, melatih manusia untuk berfikir secara rasional dan memberikan kemampuan serta ketrampilan untuk merumuskan pikiran dan pendapat secara logis dan sistematis.

Kualitas DPRD juga ditentukan oleh banyaknya pengalaman, salah satunya berpengalaman dalam berorganisasi. Pengalaman dalam kegiatan organisasi dapat melatih untuk mengembangkan kecakapan, untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan masyarakat. Selain itu dapat melatih mengembangkan keterampilan dalam mengemukakan pandangan dan meyakinkan pihak lain. Hal tersebut sangat mutlak diperlukan anggota DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan peranan DPRD secara optimal akan mengubah pandangan masyarakat yang selama ini terbentuk kearah yang lebih positif. Dengan demikian masyarakat diharapkan semakin yakin dan percaya bahwa suara mereka benar-benar terwakili dan wakil-wakil mereka di DPRD benar-benar dapat diandalkan.



2.3 Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Sudjito (1983:9) menerangkan bahwa :” Peraturan Daerah adalah keputusan yang bersifat umum yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat format untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat”.

Menurut Modeong (2000:54) Peraturan Daerah adalah: ”instrumen hukum bermaksud memedomani dan mengarahkan perubahan peradaban masyarakat kearah peradaban yang lebih maju dan demokratis serta mampu mengaktualisasikan pinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara benar.

Menurut Manan dalam Modeong (2001:55) 'Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'

Berkaitan dengan pengertian Peraturan Daerah, lebih lanjut Misdayanti dan RG.Karta Saputra dalam Modeong (2000:55) menyatakan bahwa ”Peraturan daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan. Peraturan daerah yang menunjukkan ukuran berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya karena dengan peraturan daerah kita bisa melihat masalah yang telah dan akan dilaksanakan”

Didalam konsepsi Peraturan Daerah tersebut, terkandung pengertian bahwa Peraturan Daerah itulah peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibuat bersama oleh lembaga pemerintahan daerah otonom yang berwenang, serta merupakan undang-undang yang menjadi alat untuk memperlancar dan

menjadi tolok ukur bagi penentuan berhasil atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan pengertian Peraturan Daerah di atas terkandung maksud bahwa Peraturan Daerah itu ialah peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibuat bersama oleh lembaga-lembaga Pemerintah Daerah otonom yang berwenang serta merupakan undang-undang yang menjadi alat untuk memperlancar dan menjadi tolak ukur bagi penentuan berhasil atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah"

Dengan demikian jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat sejumlah orang sebagai representasi (wakil) atau biasa dikatakan sebagai orang yang dikuasakan oleh rakyat untuk menggantikannya dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka ditingkat daerah.

Dalam konteks kenegaraan, eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diakui sebagai lembaga yang memegang kedaulatan rakyat di daerah, artinya penjelmaan. Secara struktural posisi DPRD setara dengan Kepala Daerah dalam lingkup tugas pembuatan Peraturan Daerah (Perda), pengawas serta beberapa tugas pemerintahan dan pembangunan lainnya.

Fungsi DPRD sebagai badan legislatif daerah khususnya dalam penetapan Peraturan Daerah sebagai kebijaksanaan daerah telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam beberapa pasal :

1. Pasal 40 yang berbunyi : "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah"
2. Pasal 41 yang berbunyi : "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan"
3. Pasal 42 ayat (1) huruf a yang berbunyi : "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama"
4. Pasal 136 ayat 1 yang berbunyi : "Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD"
5. Pasal 136 ayat 2 yang berbunyi : "Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan"
6. Pasal 137 yang berbunyi : "Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
 - d. Dapat dilaksanakan
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f. Kejelasan rumusan
 - g. Keterbukaan
7. Pasal 138 ayat 1 yang berbunyi : "Materi muatan Perda mengandung asas :
 - a. Pengayoman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kenusantaraaan
 - f. Bhinneka tunggal ika
 - g. Keadilan
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Fungsi DPRD berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu BAB X .

1. Pasal 95 ayat 1 yang berbunyi: " DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah"
2. Pasal 95 ayat 2 yang berbunyi: "Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah"

3. Pasal 97 ayat 1 yang berbunyi: "Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota"

Pembatalan peraturan daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 145 :

- 1) Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah
- 3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud
- 5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung
- 6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- 7) Apabila pemerintah tidak mengeluarkan peraturan presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku

2.4 Otonomi Daerah: Demokrasi Lokal Dalam Proses Perumusan Peraturan

Daerah

Didalam konteks teoritis demokrasi selalu berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan. Dan desentralisasi pada dasarnya diwujudkan dengan adanya otonomi pada tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999. Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan ini terlihat dari kewenangan pusat yang sudah dibatasi, yang selama ini tingkatan otonomi daerah asas dekonsentrasi serta meningkatkan kewenangan DPRD.

Makna dari desentralisasi itu sendiri dapat dilihat dari banyak sisi seperti yang dikemukakan oleh Ichlasul Amal dan Nasikun (1988) yang menyoroti dari sudut pandang kandungan yang dimilikinya yaitu “desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif pada umumnya disebut dekonsentrasi dan mempunyai pendelegasian sebagian wewenang pelaksanaan pada tingkat bawah. Pejabat-pejabat lokal hanya berdasarkan rencana dan anggaran yang sudah ditentukan oleh pusat, sedangkan desentralisasi politik berarti bahwa sebagian wewenang membuat keputusan dan kontrol atas sumber-sumber dana diserahkan pada pejabat-pejabat regional atau lokal”.

Bahkan menurut Sofian Effendi (1993) “desentralisasi tidak sekedar pendelegasian otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan wewenang implementasi kepada daerah) dan devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuat kebijakan dan pengendalian sumberdaya kepada daerah)”.

Sedangkan menurut Warsito Utomo (1998) “otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa technical administration atau practical administration saja. Tetapi juga harus dilihat sebagai process of political interaction. Dan ini berarti bahwa desentralisasi atau otonomi sangat erat kaitannya dengan demokrasi, dimana yang diinginkan tidaklah hanya demokrasi

pada tingkat nasional, tetapi juga demokrasi lokal yang arahnya kepada pemberdayaan atau kemandirian daerah". Pendapat-pendapat diatas termasuk pendapat yang mungkin saja secara kontekstual, berbeda tentang desentralisasi yang diterjemahkan dalam konteks otonomi daerah dan memang itu dihubungkan karena otonomi itu sendiri sifatnya relatif dan tidak ada suatu wilayah baik negara atau daerah yang memiliki otonomi mutlak, karena interaksi yang terjadi dengan lingkungan disekitarnya. Namun persoalannya dalam negara yang demokrasi, sejauh mana otonomi tersebut memberikan posisi yang lebih besar pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Bahkan Tim Lapera (2000) menyatakan bahwa "dalam konteks hubungan pusat dan daerah yang dibangun tidak saja kedaulatan daerah, namun harus ditopang oleh kedaulatan rakyat karena pemberian kedaulatan daerah sama dengan memberikan kekuasaan atau membagi kekuasaan bagi elit daerah. Tanpa suatu kontrol yang memadai, maka elit daerah masih sangat mungkin menjadi raja kecil, yang akan berperilaku sama dengan kekuasaan pusat". Dan lebih lanjut Tim Lapera mengatakan "ukuran dasar dari otonomi, bukan terletak pada janji sejumlah komitmen, melainkan riel pada praktek : apakah otonomi benar-benar akan menempatkan rakyat pada posisi terhormat, atautkah rakyat tetap saja sebagai obyek dari elit politik". Oleh karena itu melalui demokrasi lokal diharapkan dapat diwujudkan suatu kondisi dimana rakyat memiliki posisi yang sebenarnya yakni pemilik kedaulatan tertinggi.

Dalam arti kedaulatan rakyat pada tingkat lokal akan memberikan kontribusi politik pada kedaulatan rakyat tingkat yang lebih besar, negara yang antara lain berhubungan dengan posisi rakyat dalam proses pemilihan pemimpin

publik di daerah. Dimana rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan memilih agen-agenya yang duduk sebagai wakil-wakil mereka di lembaga Legislatif maupun pemimpin publik di lembaga Eksekutif pada tingkat lokal dengan bebas dalam sistem demokratis.

Menurut Ichlasul Amal (2000) terbagi dalam tiga pola hubungan yakni : “dominasi Eksekutif, dominasi Legislatif, dan hubungan yang seimbang” dan lebih lanjut dikatakannya dalam suatu sistem politik satu negara ketiga pola hubungan tersebut tidak berjalan dengan tetap”.

Oleh karena itu untuk membangun pola hubungan yang ideal antara Legislatif dan Eksekutif dalam arti terciptanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara Legislatif dan Eksekutif akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara maka yang tercipta dua kemungkinan yaitu dominatif Eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominatif Legislatif yang menciptakan anarki politik.

Dan dalam pola yang seimbang antara Legislatif dan Eksekutif itu pulalah hubungan yang hendak dibangun antara Legislatif dan Eksekutif daerah dalam melaksanakan demokrasi lokal. Dimana melalui keseimbangan kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif di daerah diharapkan mekanisme *check and balances* di tingkat lokal dapat direalisasikan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Dan ini diawali dengan proses pemilihan pemimpin publik di daerah tidak saja menyangkut proses pemilihan kepala daerah, namun juga menyangkut keterwakilan rakyat di lembaga

perwakilan, sejauh mana lembaga perwakilan tersebut mengartikulasikan mengagreasikan serta memperjuangkan kepentingan rakyat termasuk dalam pemilihan Kepala Daerah, bila tidak dipilih langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan makro (Peraturan Daerah, terminology Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) termasuk kebijakan pusat yang dilaksanakan oleh Eksekutif untuk kepentingan rakyat.

Karena demokrasi lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi nasional, maka format demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh sistem politik nasional sehingga berkaitan dengan proses perumusan Peraturan Daerah (terminology UU Nomor 22 tahun 1999 untuk untuk kebijakan didaerah yang murni desentralisasi tanpa dekonsentrasi), tentunya tidak melampaui perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam perumusan Peraturan Daerah haruslah mempunyai legitimasi, keabsahan tidak saja legitimasi dari sudut pandang penguasa tetapi juga dari sudut pandang rakyat.

Dipandang dari sudut penguasa sebagaimana dikatakan A.M. Lipset (Budiardjo, 1996) “legitimasi menyangkut kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu”, sedangkan dari sudut pandang rakyat, sebagaimana diuraikan Miriam Budiardjo (1996) legitimasi atau “Keabsahan adalah keyakinan dari anggota-anggota masyarakat masyarakat bahwa wewenangyang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu seseuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang

sah, jadi mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar Peraturan-Peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa harus dipatuhi.

2.5 Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan

Daerah sebagai *Proses Legislatif*

Dengan mengikuti kelaziman dengan teori ketatanegaraan pada umumnya maka salah satu fungsi DPR adalah dibidang Legislatif. Fungsi Legislatif DPR tidak terlepas dari konsep “trias politica” yang ditawarkan oleh Montesquieu. Pendapat Montesquieu kekuasaan itu berada pada satu tangan maka kekuasaan itu sering disalah gunakan. Untuk mencegah penyalahgunaan ataupun penggunaan kekuasaan yang berlebih-lebihan maka kekuasaan itu dipisah-pisahkan (Thaib,1994).

Menurut konsep “trias politica” kekuasaan dalam negara dibagi ada tiga yakni, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya sistem pemisahan tersebut maka didalam konsep “trias politica” terdapat suasana “*check and balance*” karena masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi, menguji sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian akan terdapat pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut. Konsep “trias politica” tersebut diadakan modifikasi dalam sistem pemerintahan negara-negara barat. Sedangkan landasan proses kekuasaan Legislatif di Indonesia secara garis besar dilakukan oleh pihak Legislatif dan Eksekutif pada tataran DPR dan Presiden juga dilakukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah.

Lembaga Legislatif kita bukanlah konsep barat. Sebagaimana diketahui Undang-undang 1945 fungsi membuat UU yang lazim disebut fungsi Legislatif bukanlah semata-mata dilakukan oleh DPR. Jelasnya fungsi Legislatif dan ketatanegaraan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Presiden dan DPR Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Jadi adalah keliru kalau ada sementara orang yang beranggapan itu adalah mutlak pada DPR. Apabila kita tinjau dari sudut pandang UUD 1945 maka pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dari rumusan Pasal 5 ayat (1) secara tegas tanpa ragu-ragu dinyatakan bahwa:

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Bahwa undang-undang yang dibentuk Presiden harus mendapat persetujuan DPR.

Namun begitu dengan adanya hubungan antara Presiden dan DPR dalam pembuatan Undang-Undang maka Presiden tidak bisa membuat Peraturan perundang-undangan dengan sewenang-wenang karena DPR akan membatasinya dengan mengemukakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian terdapat perimbangan kekuatan antara Presiden dengan DPR.

Dengan adanya reformasi dibidang politik, hukum, dan perundang-undangan maka kedudukan DPRD dan Pemerintah Daerah mengalami perubahan yang mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan tempat yang berbeda antara Legislatif dan lembaga Eksekutif. Didalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa "Di Daerah dibentuk DPRD sebagai dewan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Eksekutif Daerah". Sementara itu yang dimaksud

dengan pemerintah Daerah adalah hanya “kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya”. Dan yang perlu kita catat adalah “Kedudukan” diantara lembaga tersebut adalah “sejajar dan menjadi mitra” sekaligus (Pasal 16). Kalau ini dikatakan sebagai ide demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kita dapat melihat misi demokrasi yang diemban oleh UU Otonomi Daerah yang baru ini. Kedudukan akan menjadi lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan didepan hukum, kebebasan berserikat dan sebagainya yang terdapat dalam sistem pemerintahan demokrasi. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka dalam lembaga perwakilan (Sarjen, 1981).

Hubungan kemitraan akan tampak jelas jika diletakkan dalam konteks tugas dan wewenang DPRD antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) Huruf d : “bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah”.
2. Pasal 18 ayat (1) huruf e : “bersama dengan Gubernur, Bupati, walikota menetapkan APBD”.
3. Pasal 18 ayat (1) huruf g : “memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah”.(Bambang, 2001; 96)

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD bermitra dengan Kepala Daerah. Dalam pasal 14 undang-undang nomor 22 tahun 1999 secara jelas disebutkan pembagian tugas antara DPRD dengan Kepala Daerah yaitu DPRD

sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan Eksekutif Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah. Baik DPRD maupun Pemerintah Daerah berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan f dinyatakan DPRD mempunyai hak:

1. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah.
2. mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Sedangkan pada Pasal 43 huruf g dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Kalau DPRD memiliki fungsi mandiri berupa pengawasan dan perwakilan maka Kepala Daerah memiliki fungsi mandiri berupa pembuatan keputusan Kepala Daerah untuk menjabarkan Peraturan Daerah dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah ialah melaksanakan kebijakan publik, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Daerah, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat, mencari dan mengolah informasi yang diperlukan. Perangkat Daerah, seperti dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya. Yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang sehari-hari melaksanakan keempat bentuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut dibawah pengendalian dan pengarahan Kepala Daerah. Hal ini DPRD akan lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi perwakilan, sedangkan perangkat Daerah dan Kepala Daerah akan lebih menonjol dalam implementasi kebijakan, penegakan Peraturan, dan pemberian pelayanan publik kepada warga masyarakat.

Karena itu tidak mengherankan bila hubungan DPRD dengan jajaran Eksekutif Daerah akan lebih berlangsung dinamis karena penuh perdebatan dan adu argumentasi, tanya jawab yang hidup dan transparan, dan konflik kepentingan. DPRD misalnya agar APBD dan Peraturan Daerah lainnya agar dirumuskan secara operasional tidak saja menyangkut kewenangan Legislatif mereka tetapi juga karena harus memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah mungkin sukar menerima kenyataan ini mengingat pada masa lalu kalangan Eksekutiflah yang secara praktis menentukan arah dan bentuk APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Kalangan Eksekutif harus belajar menerima kenyataan yang seharusnya itu. Tetapi kalangan Eksekutif tidaklah begitu saja kehilangan pengaruh karena bertindak proporsional perangkat Daerah justru unggul dalam informasi dan keahlian. Dialek kita antara aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para anggota DPRD dan program yang disusun berdasarkan informasi (yang lengkap dan akurat) dan keahlian yang dibawa oleh pihak jajaran Eksekutif justru akan melahirkan keputusan politik yang terbaik menurut ruang dan waktu tetapi dapat dilaksanakan.

Hubungan DPRD dan jajaran Eksekutif yang dinamis juga terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi perwakilan DPRD. Dari ketiga fungsinya tersebut, kemungkinan besar pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi perwakilanlah yang akan sangat menonjol. Berangkat kewenangan DPRD meminta keterangan yang akan disertai ancaman sanksi bagi yang menolaknya, keberanian para anggota DPRD semakin meningkat baik untuk menggunakan hak meminta keterangan kepada Pemda, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak

mengadakan penyelidikan dan hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun mengajukan pertanyaan kritis secara transparan. Hal ini tidak saja memerlukan sikap dan perilaku dari pihak Eksekutif karena pada masa lalu mereka mudah sekali menjinakkan pertanyaan anggota DPRD tetapi juga memerlukan pendekatan baru dalam merespon pertanyaan yang kritis dari para anggota DPRD. Pendekatan baru yang dimaksud adalah profesionalisme dalam melaksanakan tugas mentaati hukum dalam menggunakan kewenangan, dan transparan dan kejujuran dalam sikap dan tindakan.

Dalam melaksanakan fungsinya DPR maupun DPRD mempunyai hak-hak; mengadakan penyelidikan (angket) dan mengubah aturan yang berlaku (amandemen).

2.6 Penyebab Kinerja Legislatif

Faktor – faktor penyebab kinerja legislatif yang dirumuskan oleh James Lee (dalam Riswandha 2001:156 – 175) dapat digunakan untuk mempelajari faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2004 – 2009. Menurut Lee faktor – faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu eksternal dan internal.

1. Faktor eksternal bagi Lee adalah stimuli Eksternal. Ini berarti kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pihak – pihak diluar dari legislatif berpengaruh terhadap kinerjanya. Ada 3 (tiga) macam stimuli eksternal yaitu :

- a. Afiliasi Partai Politik

Adanya afiliasi partai politik ataupun kerjasama antar partai politik dapat mempengaruhi kinerja seorang anggota legislatif. Ini berarti apabila stimuli kuat dari anggota partai, maka ada dorongan untuk inisiatif namun

sebaliknya apabila tidak ada stimuli dari partai maka dorongan tidak ada bagi anggota legislatif untuk inisiatif.

b. Kepentingan pemilih dan aktivitas kelompok penekan

Setelah terpilih menjadi Anggota Legislatif, Pemilih akan lebih memperhatikan wakilnya tersebut dengan cara membuat kontrak politik atau hal lain agar wakilnya tersebut tetap sesuai dengan aspirasinya.

Kelompok – kelompok penekan berusaha menekan Anggota DPRD untuk menghasilkan keputusan atau peraturan yang menguntungkan bagi kelompoknya. Kelompok Penekan disini dapat berupa Ormas, LSM dan lain – lain.

c. Peran Eksekutif

Eksekutif memiliki peran yang cukup dominan dalam pengambilan keputusan di parlemen.

2. Stimuli Internal yang terdiri dari

a. Setting psikologis, yaitu predisposisi personal, sikap, dan peran-peran yang dijalankan, serta harapan-harapannya.

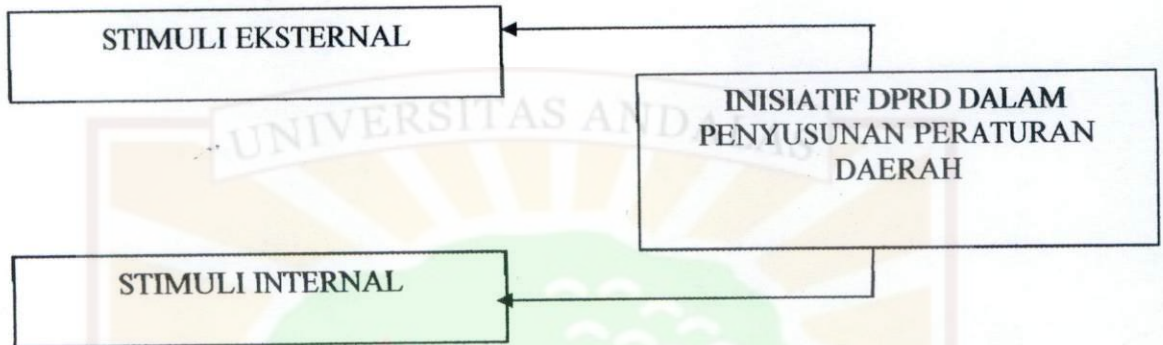
b. Komunikasi Intra-institusional, baik formal maupun informal yang berpotensi menggantikan atau membesarkan pengaruh faktor-faktor lain yang telah disebutkan.

Berdasarkan teori tersebut, alat analisis yang dipakai pada penelitian adalah Afiliasi Partai Politik, Kepentingan pemilih, peran eksekutif dan persepsi anggota DPRD.

Secara skematis pengaruh ini pada bagan berikut:

Gambar 3.1

Skematik Proses Legislatif.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah harus melalui langkah-langkah sistematis agar diperoleh data yang relevan dan dapat mendukung obyektivitas pembahasannya. Langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan metode dan teknik yang dipergunakan.

Desain dalam suatu penelitian merupakan suatu Tahap yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam arti sempit penelitian hanya membahas tentang pengumpulan dan penganalisaan data, sedangkan dalam arti luasnya mencakup pada Tahap yang berkepanjangan.

Menurut Nazir (1998:99) penelitian adalah :”Suatu Tahap mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku”.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi populasi (seperti penelitian kuantitatif) melainkan lebih terfokus pada representasi terhadap fenomena sosial. Data dan informasi pada penelitian kualitatif harus ditelusuri seluas-luasnya (dan sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh (Kanto, 1998).

Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif diatas, maka pada prosedur sampling, yang terpenting adalah bagaimana penentuan informan (*key forman*) atau situasi sosial tertentu sesuai dengan syarat penelitian. Sehingga untuk memilih sampel (*sampling*) yang digunakan bukanlah sampel statistik atau *probability sampling* seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Namun lebih bersifat selektif, dimana peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep/teoritis yang dipergunakan, keingintahuan pribadi dan karakteristik pribadi, sehingga diharapkan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti, yang lebih berharga dari sekedar pertanyaan jumlah atau frekwensi dalam bentuk angka.

Informan dipilih secara purposive (*purposive sampling*). Pemilihan informan didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu :

1. Yulius Danil (Ketua DPRD) : 1 orang
2. Drs. Akhiardi dan Zulkifli Sabata (Wakil Ketua DPRD) : 2 orang
3. Iskandar Bustami, Desril, Eri Zulfian, Sudirman Nazar, Drs Wisran Darwis, Komi Chaniago, HM Syatar (Ketua Fraksi) : 7 orang

4. Halim Chan, Hendri Gusvira, Hafrizal (Ketua Komisi)	:	3 orang
5. Asmadi, Yohanes Wempi, Wisran (Pimpinan Parpol)	:	3 orang
6. Ali Risa, Drs Basnil, Andi Eljusra (Anggota DPRD)	:	3 orang
7. Kabag Hukum, Sekretaris Dewan (Eksekutif)	:	2 orang
8. Ketua Forum Komunikasi LSM Kab Padang Pariaman	:	1 orang
9. Ketua Forum Peduli Kab Padang Pariaman	:	1 orang
10. Ketua Forum Nelayan Kec Sungai Limau	:	1 orang
11. Ketua MUI	:	<u>1 orang</u>
		25 orang

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil data yang diperoleh dari studi lapangan. Yang dimaksud dengan studi lapangan adalah pengamatan secara langsung tentang obyek atau daerah penelitian. Studi lapangan ini dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Sehubungan dengan masalah penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Studi lapangan dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (indepth interview) yang dipandu oleh sebuah pedoman wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber penting di lokasi penelitian yang dianggap mewakili kelompok – kelompok yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penentuan narasumber tersebut dilakukan

dengan metode purposive sampling yakni dengan memerhatikan kemampuan maupun pengetahuan narasumber tentang topik yang dikaji.

Moleong berpendapat, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan wawancara dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Sedangkan yang dimaksud wawancara mendalam menurut Taylor adalah sebuah wawancara tidak terstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang – ulang. Berulang – ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama akan tetapi menanyakan hal yang berbeda dan mengklarifikasi informasi – informasi yang sudah didapat sebelumnya.

Wawancara peneliti lakukan untuk mendapatkan gambaran penyebab – penyebab rendahnya inisiatif DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dimana hasil wawancara direkam dengan menggunakan tape recorder dan apabila tidak mendapatkan izin dari informan, maka hasil wawancara juga dapat dicatat sambil mendengarkan. Wawancara yang telah dilakukan diantaranya dengan mendatangi rumah informan namun ada juga yang diwawancarai di kantor tempat informan bekerja.

2. Dokumentasi

Untuk mendukung wawancara mendalam dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi menurut Guba dan Lincoln memberikan definisi dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, dimana dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumentasi resmi internal dan eksternal yang tentunya berhubungan dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah. Yakni Notulen Rapat, Surat-surat dinas, berita acara, daftar hadir rapat, nota penjelasan bupati, bahan sidang paripurna, naskah akademis dan berita koran.

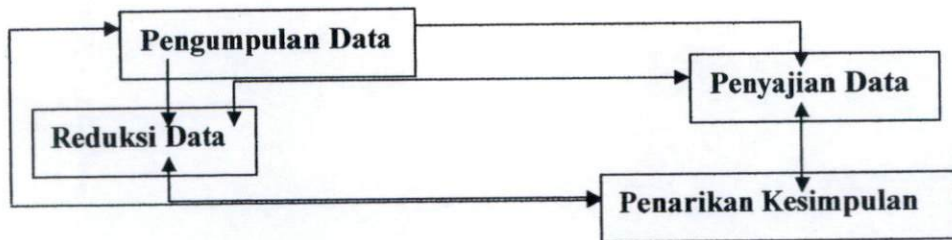
3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1998:419), “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk di baca”. Adapun langkah-langkah dalam analisis data yang dilakukan penulis sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (1988:129), adalah :

Analisis data mencakup kegiatan menelaah data, membaginya menjadi satuan- satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari pola menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan (Bogdan & Biklen,1990).

Proses analisis data dalam penelitian ini digunakan model Miles dan Huberman (1987 : 21 – 25) yaitu menggunakan analisis interaktif:

Gambar: 3.1
Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman terjemahan Tjejep R.R, 1987.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara dan melihat dokumentasi yang ada.

2. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa atau berbentuk uraian atau laporan terperinci yang pasti akan terasa sulit bila tidak direduksi, dirangkum hal-hal penting dicari polanya. Jadi laporan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display Data

Untuk dapat melihat secara keseluruhan pada bagian-bagian tertentu dari penelitian, dengan menggunakan tabel, grafik dan peta agar peneliti dapat menguasai data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penulis mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu penulis mencari pola, tema, kesamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan lain sebagainya. Jadi data yang akan diperoleh, sejak mulanya diambil kesimpulan itu mula-mula masih relatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan

bertambahnya data, kesimpulan itu menjadi lebih tepat dalam pemecahan dan penyelesaian cara bertindak. Jadi, jelaslah bahwa kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selana penelitian berlangsung.

3.6. Tempat dan Waktu Penelitian

TABEL 3.2
JADWAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
TAHUN AKADEMIK 2008-2009

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Kabupaten Padang Pariaman

4.1.1 Keadaan Geografi

Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0 11' - 0 56' Lintang Selatan dan 98 36' - 100 28' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 1.328,79 km dengan panjang garis pantai 60,50 km. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Luas ini merupakan luas kabupaten terkecil diantara kabupaten – kabupaten di Sumatera Barat. Sejumlah kebijakan telah berkonsekuensi terhadap semakin berkurangnya luas Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1980, sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Koto Tangah, Pauh dan Lubuk Begalung dilepas untuk perluasan wilayah bagi Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan UU nomor 49 Tahun 1999, Kabupaten Padang Pariaman berkurang lagi seluas 6.011,35 Km² seiring ditetapkan Kepulauan Mentawai sebagai daerah otonom. Terakhir, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2002, status kota administratif Pariaman meningkat menjadi kota otonom yang mengurangi luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman seluas 73,36 Km².

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 46 Nagari dan 364 Korong. Sedangkan jumlah curah hujan pada tahun 2003 rata-rata 357,72 mm/bulan.

Secara administratif Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara

Berbatasan dengan Kabupaten Agam

2. Sebelah Selatan

Berbatasan dengan Kota Padang

3. Sebelah Barat

Berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Hindia

4. Sebelah Timur

Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok

Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah yang cukup strategis dengan sarana dan prasarana yang baik. Hubungan antar kecamatan dan ibukota sangat lancar. Sarana dan prasarana perhubungan yang menghubungkan antara kecamatan satu dengan yang lain pada umumnya telah di aspal dan berada dalam kondisi yang baik, sehingga memungkinkan lancarnya arus lalu lintas dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat meningkat dari waktu ke waktu.

4.1.2 Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan dan merupakan faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan. Pertambahan penduduk yang sangat pesat akan mengakibatkan dua alternatif yaitu sebagai pendukung pembangunan apabila bertambahnya tenaga kerja dan sebagai penghambat pembangunan apabila adanya pengangguran yang menimbulkan masalah-masalah sosial.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data monografi Tahun 2008 berjumlah 370.489 jiwa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2006-2008

Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
207.387	225.423	178.025	190.123	180.763	189.727
432.790		368.168		370.489	

Sumber : Badan pusat Statistik Kab Padang Pariaman,2008

Dari tabel dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2006 sampai 2008 mengalami penurunan sebesar 1,16 %. Hal ini merupakan modal dasar bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menekan jumlah penduduk. Sehingga pemerintah tidak perlu untuk bekerja keras dalam menghadapi penduduk namun tinggal memberdayakannya.

4.1.3 Keadaan Sosial Politik

Keadaan sosial politik suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembangunan. Apabila keadaan sosial politik tidak aman atau tidak terkendali maka akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Kerusuhan yang sifatnya sporadis belum pernah terjadi dan meluas. Kalaupun ada hanyalah sebatas persoalan kecil dan dapat diselesaikan oleh warga masyarakat sendiri dengan jiwa kekeluargaan dan kebersamaan.

Secara umum stabilitas politik di Kabupaten Padang Pariaman aman dan terkendali. Pada saat penulis melakukan penelitian, keadaan sosial politik masyarakat Kabupaten Padang Pariaman berjalan secara terarah. Hal ini karena cukup tingginya kesadaran masyarakat yang sehari-harinya hidup dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku, sehingga tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan dapat terarah dan menjurus pada hal-hal positif atau membangun.

Dalam era reformasi, kehidupan sosial politik Kabupaten Padang Pariaman berjalan baik ditandai dengan tingginya partisipasi rakyat dalam mengikuti pemilihan umum Tahun 2004. Keikutsertaan masyarakat menggunakan

hak pilihnya dalam pemilu dapat dijadikan tolak ukur partisipasi dan kedewasaan suatu Negara dalam berpolitik telah berhasil ditegakkan. Beberapa warga negara yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu juga dijadikan ukuran tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara telah tercapai.

4.1.4 Keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah dan janjinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD yang belum diambil sumpah dan janjinya, akan diambil oleh pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman hasil pemilihan umum tahun 2004 tercatat sebanyak tiga puluh lima orang. Terdiri dari fraksi Partai Golkar sembilan orang, PBB empat orang, PDIP tiga orang, PKS empat orang, PAN lima orang, PPP empat orang, Partai Demokrat dua orang, dan dari PNI Marhaenisme, PKPI, PBR, PSI masing-masing satu orang. Dari tiga puluh lima orang anggota DPRD tersebut hanya terdapat dua orang perempuan.

Sesuai hasil pemilihan umum pada tanggal 4 Juli 2004 lalu dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan pasal 50 ayat 2 yang menjelaskan bahwa jumlah kursi anggota Kabupaten/Kota didasarkan pada



(lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.

b. Mengajukan pertanyaan

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan tersebut disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan tersebut untuk ditindaklanjuti. Apabila perlu ditindaklanjuti, maka pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah yang menyampaikan jawaban secara tertulis, tidak dapat lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan. Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan. Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, anggota DPRD dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.

c. Menyampaikan usul dan pendapat

Setiap anggota DPRD dalam rapat – rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD. Usul dan pendapat tersebut disampaikan

dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan wakil rakyat.

d. Memilih dan dipilih

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.

e. Membela diri

Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD. Hak membela diri dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

f. Imunitas

Anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat – rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan atau hal – hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua bab I Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

g. Protokoler dan keuangan

Hak protokoler dan keuangan diatur tersendiri dengan peraturan daerah berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. kewajiban anggota DPRD

- a. Mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada daerah pemilihannya
- i. Menaati Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait

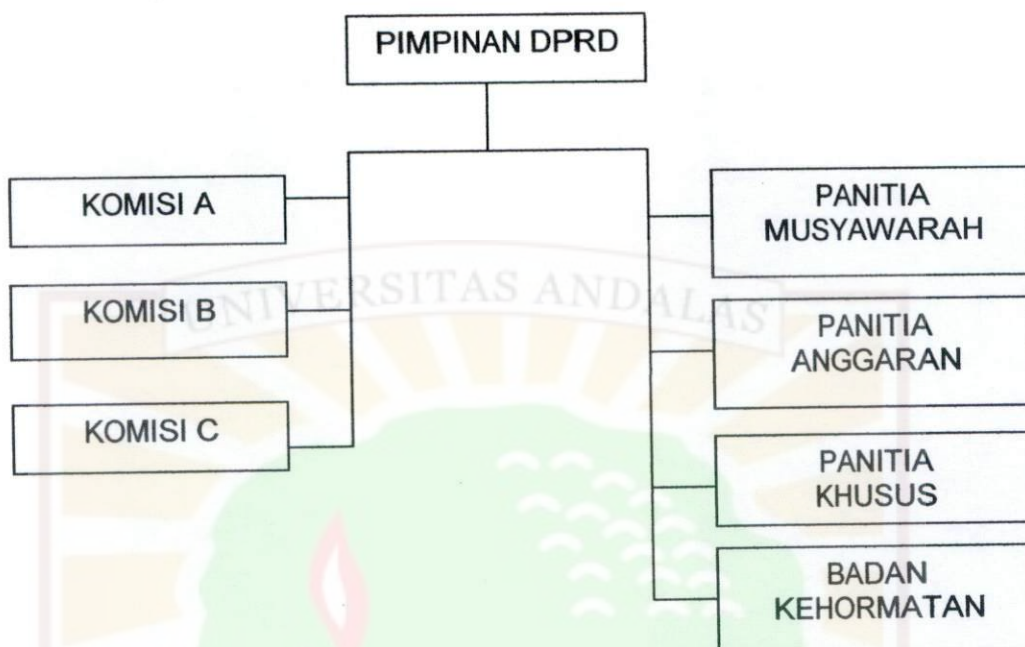
4.1.6 Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD merupakan keseluruhan unit tugas dan kelengkapan organisasi yang membantu DPRD dalam menjalankan tugasnya. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, Badan Kehormatan, dan Panitia-panitia.

Untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, 2009

4.1.6.1 Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD dan merupakan kesatuan yang bersifat kolektif dan cerminan dari fraksi-fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa jabatan pimpinan DPRD tidak berbeda dengan masa jabatan anggota DPRD yang lainnya.

Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Pimpinan dipilih oleh dan dari anggota DPRD dalam rapat paripurna

DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Hak dan kewajiban pimpinan DPRD tidak berbeda dengan hak dan kewajiban anggota DPRD lainnya.

4.1.6.2 Komisi-Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD harus menjadi salah satu anggota komisi. Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing-masing ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Jumlah Komisi pada DPRD Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya empat Komisi. Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul fraksinya. Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

Adapun tugas-tugas komisi antara lain:

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

DPRD Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari tiga komisi yaitu :

a. Komisi A : Bidang Pemerintahan

Mempunyai ruang lingkup tugas bidang Pemerintahan, Ketertiban, Penerangan dan Pers, Hukum dan Perundang-Undangan, Aparatur, Perizinan, Pertanahan, Sosial Politik, Pertahanan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Adapun susunan keanggotaan komisi A DPRD kabupaten Padang Pariaman periode 2004-2009 dapat dilihat pada lampiran.

b. **Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan**

Mempunyai ruang lingkup tugas bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Logistik, Pariwisata, Pasar, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal. Adapun susunan keanggotaan komisi B DPRD kabupaten Padang Pariaman periode 2004-2009 dapat dilihat pada lampiran.

c. **Komisi C : Bidang Pembangunan dan Kesra**

Mempunyai ruang lingkup tugas bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Pertambangan dan Energi, Perhubungan, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Ilmu dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Kewanitaan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Transmigrasi. Adapun susunan keanggotaan komisi C DPRD kabupaten Padang Pariaman periode 2004-2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

4.1.7 Fraksi DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD melainkan bentukan dari kelompok golongan politik yang ada di DPRD. Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD.

Hal ini disebabkan karena pembentukan fraksi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota DPRD. Dengan adanya fraksi yang lengkap dan susunan kepemimpinannya akan mempermudah pembahasan masalah antar fraksi di Dewan.

Fraksi juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai politik karena fraksi di DPRD berfungsi sebagai perwakilan partai politik. Keinginan fraksi merupakan keinginan partai politik yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pembentukan fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya lima orang untuk setiap fraksi. Namun saat berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 ketentuan tersebut diubah. Jumlah anggota tiap fraksi sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD tersebut. Di DPRD Kabupaten Padang Pariaman komisi berjumlah tiga, maka sekurang-kurangnya tiga orang dapat membentuk satu fraksi. Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau dapat membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya tiga orang

Pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi dan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna.

4.2. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah, rancangan dapat berasal dari pihak Eksekutif yaitu Pemerintah Daerah dan dapat berasal dari pihak Legislatif Daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan hak prakarsa/inisiatif. Apabila terdapat dua rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang dibuat Kepala Daerah dipergunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam proses penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD mempunyai perbedaan dengan proses penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah atas usul Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama penelitian, maka dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sangat diperlukan adanya koordinasi kerja antara badan Legislatif dan Eksekutif sehingga proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah baik atas usulan DPRD maupun dari pihak Eksekutif daerah memiliki perbedaan.

Dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Yulius Danil mengatakan :

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan oleh Instansi di Sekretariat Daerah atau Dinas atau Badan. Penyiapan materi atau naskah peraturan menurut pemikiran dari Instansi, Dinas atau Badan yang bersangkutan disertai dengan



penyediaan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari materi yang akan diajukan.¹

Pra Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun akan mendapatkan persetujuan awal dari Kepala Daerah untuk dilakukan penyempurnaan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum. Bagian Hukum akan mengadakan penelitian dan penyempurnaan terhadap materi yang diajukan dengan memperhatikan nilai hukum, bahasa hukum dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun sebelumnya diadakan rapat pembahasan dengan instansi daerah terkait untuk mendapatkan masukan yang mendukung Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini dihubungkan dengan kebijaksanaan Kepala Daerah sesuai dengan materi konsep Peraturan Daerah.

Rancangan yang telah selesai di bagian hukum, diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan disertai nota pengantar Bupati Padang Pariaman yang menjelaskan tentang :

1. Alasan pengajuan atau pertimbangan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah
2. Harapan agar DPRD dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam rapat-rapat atau sidang yang menjadi fungsinya
3. Harapan agar DPRD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang didasarkan atas pembahasan dalam sidang-sidang dan rapat-rapat yang dilakukan

Sekretaris Dewan akan melakukan penomoran dan memperbanyak isi Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk disebarluaskan ke seluruh anggota

¹ Wawancara tanggal 19 Agustus 2009

DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini bertujuan agar materi rancangan peraturan tersebut dapat dipelajari terlebih dahulu.

Pada tahap awal penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif tidak ada hambatan yang berarti karena adanya garis kebijakan yang telah ditentukan oleh Bupati Padang Pariaman dan didukung dengan loyalitas yang tinggi dan kualitas pendidikan perangkat daerah yang lebih baik dari anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Akibatnya sampai saat ini Peraturan Daerah masih didominasi oleh pihak Eksekutif daerah.

Tahap selanjutnya dilaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam sidang paripurna tingkat I yang mengagendakan penjelasan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.

Sidang Paripurna Tingkat II dibahas dengan mengagendakan:

1. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
2. Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Pada Sidang Paripurna Tingkat II ini, anggota DPRD banyak menggunakan haknya sehingga sering terjadi perdebatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Bagian Hukum, anggota Dewan saat ini terkesan kurang memahami aspirasi masyarakat dan kurang paham dengan materi Rancangan Peraturan Daerah. Akibatnya anggota Dewan meminta perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Eksekutif tersebut. Tapi Dewan tidak pernah memberi masukan untuk perbaikan Peraturan Daerah yang ditolak tersebut tanpa memberi jalan keluar atau solusi. Pada tahap ini, Kepala Daerah dapat menunjuk

pejabat yang paling berkompeten terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah sebagai wakilnya.

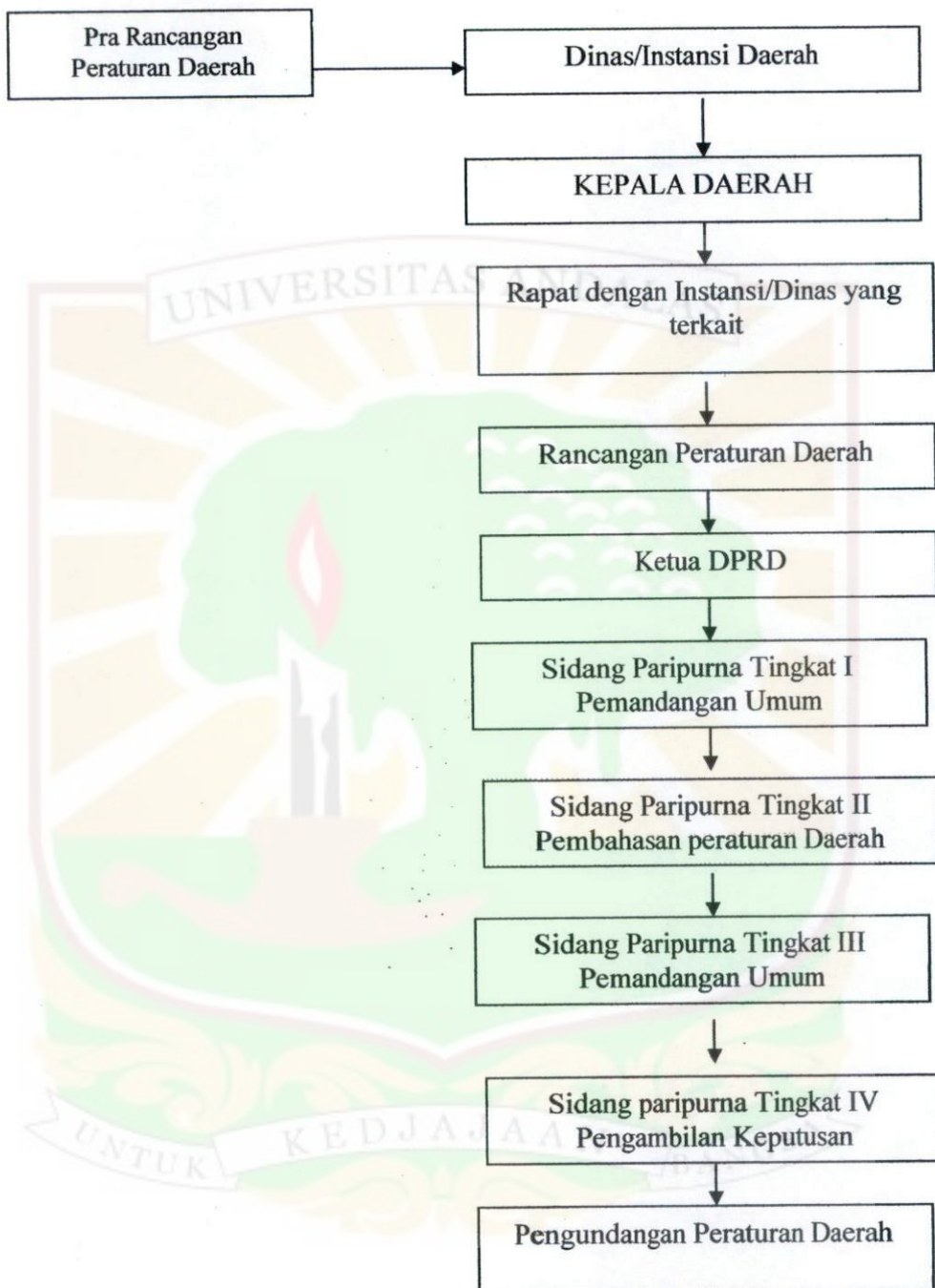
Pada Sidang Paripurna Tingkat III diagendakan pemberian kesempatan kepada anggota DPRD untuk memberikan pandangannya dengan membawakan suara fraksi-fraksinya terhadap hasil-hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kepala Daerah memberikan jawaban terhadap pandangan umum dari anggota Dewan.

Pada sidang paripurna tingkat IV mengagendakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan Sidang Paripurna Tingkat III, pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan. Pada Sidang Paripurna ini pun diberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Penetapan Peraturan Daerah dilakukan dengan Surat Keputusan DPRD dan hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah. Tanggal penandatanganan Peraturan Daerah tersebut merupakan tanggal penetapan. Sedangkan pengundangan Peraturan Daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah dengan dilakukan registrasi terhadap Peraturan Daerah dan ditempatkan pada Lembaran Daerah.

Untuk lebih jelasnya dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah dapat dilihat dari bagan di bawah ini

GAMBAR 4.2
MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH ATAS USULAN PEMERINTAH DAERAH



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, 2008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD berbeda dengan yang diajukan oleh Eksekutif. Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh anggota Dewan dan disampaikan kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan dan nama fraksinya. Sekretaris DPRD akan melakukan penomoran dan diberikan kepada seluruh anggota Dewan untuk dipelajari terlebih dahulu.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02/KEP.D/DPRD/2006 pasal 29 menyatakan bahwa pengajuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus diusulkan sekurang-kurangnya oleh lima orang anggota DPRD.

Setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia musyawarah diadakan Sidang Paripurna DPRD. Dalam Sidang Paripurna tersebut pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah dan pandangan umum dari anggota Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Pada tahap ini para anggota DPRD lainnya dapat mengadakan tanya jawab seputar Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Sidang diakhiri dengan pengambilan keputusan DPRD tentang penetapan Rancangan Peraturan Daerah atas usulan Dewan. Selama usulan prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan para pengusul dapat mengajukan perubahan atau pencabutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sebelumnya.

Apabila ada dua rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang

diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi hak prakarsa DPRD dan dibawa pada Sidang Paripurna Tingkat I (satu). Di dalam Sidang ini pengusul dalam hal ini pimpinan komisi/ gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan latar belakang dan alasan-alasan mengapa Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat didepan seluruh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Sidang Paripurna Tingkat II diagendakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

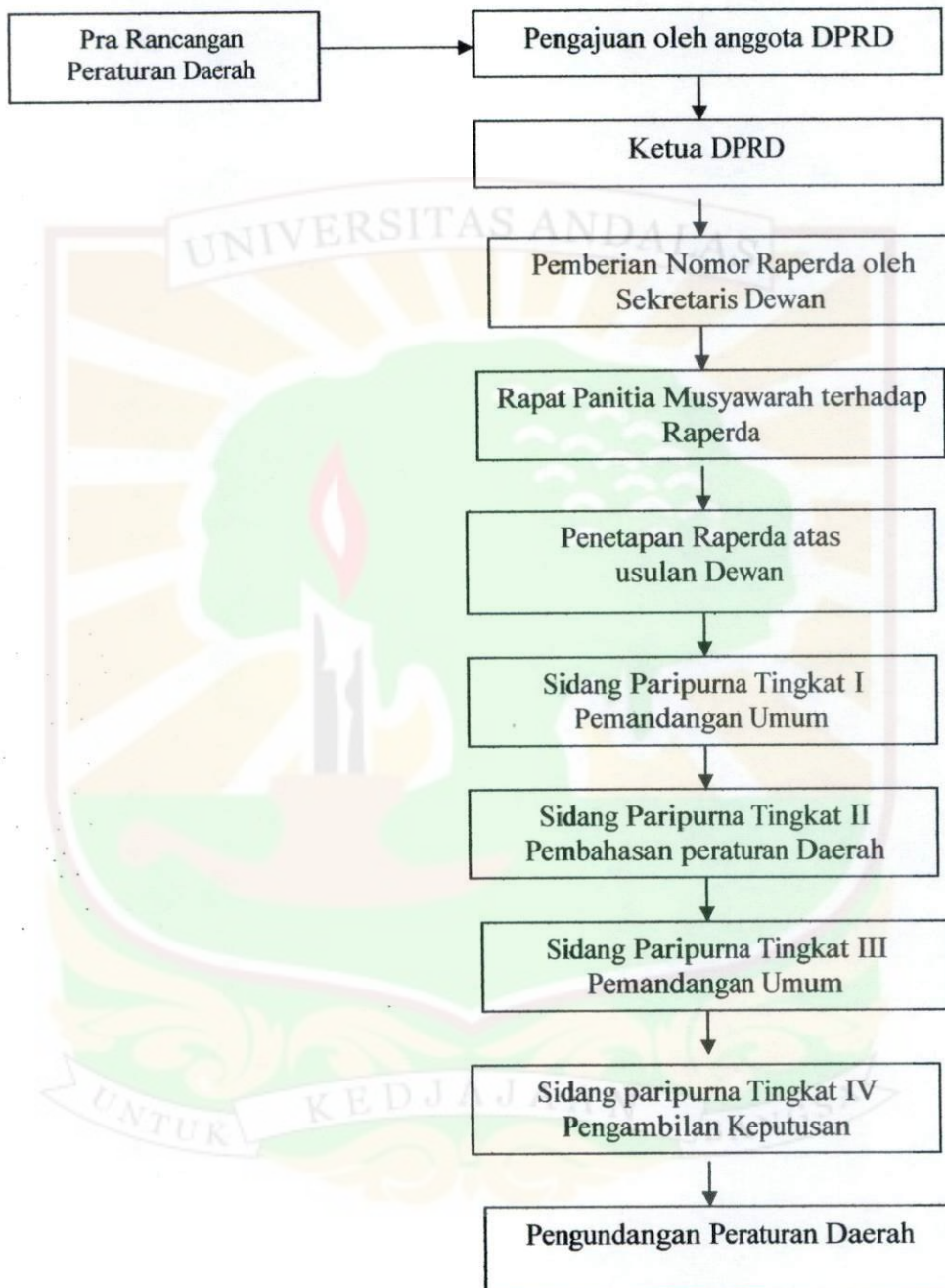
Pada sidang paripurna tingkat III diagendakan pembahasan dalam rapat komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Apabila dipandang perlu panitia musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan sidang paripurna tingkat III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam rapat panitia khusus.

Penetapan Peraturan Daerah dilakukan dengan Surat Keputusan DPRD dan hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah. Tanggal penandatanganan Peraturan Daerah tersebut merupakan tanggal penetapan. Sedangkan pengundangan Peraturan Daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah dengan dilakukan registrasi terhadap Peraturan Daerah dan ditempatkan pada Lembaran Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah atas usulan DPRD, maka dapat kita lihat pada bagan berikut:

GAMBAR 4.3

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH ATAS USULAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, 2008

Dari data yang penulis dapatkan, berikut akan dibahas mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dibagi pada tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau dari usulan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan usulan Eksekutif yang dibuat oleh Bagian Organisasi SetdaKab Padang Pariaman. Usulan ini diajukan oleh Bupati Padang Pariaman tanggal 23 Oktober 2007.²

2. Tahap Pembahasan

Adapun Tahap pembahasan ini dapat dibagi dalam beberapa persidangan yaitu :

a. Sidang Paripurna Tingkat I

meliputi pandangan atau penjelasan umum dari pihak pengusul terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan. Pada Tahap ini Pihak Pengusul dalam hal ini Eksekutif diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab Pd Pariaman

H.Sudirman Gani,SH,MM menyampaikan :

Ranperda tentang SOTK ini amat penting sekali bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, karena merujuk pada PP No 41 Tahun 2007 bahwa paling lambat 2 tahun setelah terbitnya PP ini, seluruh SOTK Prov/Kab/Kota harus berpedoman kepada PP ini.

² Risalah Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

b. Sidang Paripurna Tingkat II

Pada sidang ini dilakukan beberapa tahap :

1. Rapat Gabungan komisi – komisi

Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2008 ini, dimulai dengan pandangan Komisi A yang diwakili oleh Dasmara

Komisi A belum membahas pasal demi pasal Cuma baru membahas nomenklatur SOTK yang dimaksud, namun kami menanyakan bagaimana kalau Bagian Pemerintahan Nagari diganti nama menjadi Administrasi Kemasyarakatan dan Asisten diciutkan menjadi 2?

Komisi B yang diwakili oleh Asmadi

Harusnya penyusunan SOTK ini disesuaikan dengan kultur dan finansial/keuangan daerah. Bagaimana kalau dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan disatukan sehingga jumlah dinas yang semula 12 menjadi 11 buah? kemudian Bagian Umum digabung dengan Humas dan Protokol?

Komisi C yang diwakili Happy Neldi, SE

Mohon penjelasan bagaimana dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada di daerah dengan adanya Badan Pertanahan Daerah yang akan dibentuk?

2. Rapat mendengarkan jawaban kepala Daerah terhadap pandangan Komisi

Kepala Daerah diwakili oleh Sekda, Asisten I, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, BKD, Bawasda dan Kabag Inforkom.

Jawaban atas pandangan Komisi A:

Bagian Administrasi Kemasyarakatan pada struktur yang ada dan di daerah kita kemasyarakatan tersebut adalah pemerintahan Nagari. Mengenai asisten yang berjumlah tiga itu telah sesuai dengan PP no 41 Tahun 2007 dan Juklak dan Juknis.

Jawaban atas pandangan Komisi B

Penggabungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan belum dapat kami terima, karena pertanian menjadi primadona kita. Bagian Umum tidak bisa digabung dengan Humas dan Protokol.

Jawaban atas pandangan komisi C

Masalah pertanahan sudah diserahkan oleh pusat kepada daerah dan sudah menjadi kewenangan daerah. Hal ini tentu tidak mungkin dikelola oleh Sub Bagian

c. Sidang Paripurna Tingkat III

Pada sidang Paripurna ini sering terjadi penundaan sidang dikarenakan tidak quorumnya anggota DPRD yang hadir dan Rapat yang tidak dihadiri langsung oleh Bupati selaku pengambil kebijakan. Pada tanggal 10 Februari 2008 disepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Dinas yang dibentuk adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
2. Bagian Umum dipisah dengan Humas dan Protokol
3. Masalah Pertanahan tidak ditangani oleh badan tapi bagian Agraria dibawah Sekda

d. Sidang Paripurna Tingkat IV

Dimulai dengan pandangan Akhir dari fraksi – fraksi sebagai berikut :

Fraksi Golkar dengan juru bicara Hendri Gusvira, ST

Fraksi Golkar dapat menerima nomenklatur SOTK yang terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten dan 11 Bagian, Sekretariat Dewan dengan 4 bagian, Dinas – dinas daerah 14 buah, Badan 8 buah, kantor 5 buah, staf ahli 5 bidang dan SOTK Kecamatan. Hal yang perlu mendapat perhatian oleh eksekutif, pengisian SOTK agar diperhatikan Sumber daya manusia lokal yang mempunyai potensi, SKPD yang berwawasan dan profesional dan terjauh dari Nepotisme.

Fraksi PPP dengan juru bicara H Sudirman Nazar

Fraksi PPP dapat menerima Nomenklatur SOTK namun yang perlu mendapat perhatian oleh Eksekutif dalam pengisian personil nantinya agar menempatkan orang – orang pada posisi yang benar dan SKPD agar dapat memperhatikan profesionalisme kerja.

Fraksi PBB dengan juru bicara Zulhelma, S.Ag.MM

Kami dari Fraksi PBB memberikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan SOTK Kabupaten Padang Pariaman antara lain penempatan personil disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kejujuran dan mental yang baik sangat penting dalam penempatan seseorang, jangan meminta – minta jabatan, karena orang yang meminta – minta jabatan tidak mengerti dengan pekerjaan.

Fraksi PDI-P dengan juru bicara Drs.H Wisran Darwis

Pertimbangan serta saran yang perlu mendapat perhatian oleh Eksekutif dalam pengisian personil nantinya yaitu kiranya penempatan pejabat yang profesional perlu pengkajian yang lebih mendalam, dan SOTK yang telah dibentuk dapat kiranya meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Fraksi PKS dengan juru bicara Yardi

Dengan ini Fraksi PKS memberikan saran untuk kedepan kiranya dapat membantu masyarakat dan membangun Padang Pariaman.

Fraksi Madani dengan juru bicara Happy Neldi, SE

Hal – hal yang perlu mendapat perhatian oleh Eksekutif dalam pengisian personil nantinya adalah kiranya diperlukan penyegaran bagi personil yang telah lama dalam satu SKPD, pengesahan SOTK ini dapat membantu percepatan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, menempatkan orang – orang pada posisi yang benar dan punya etos kerja, SKPD berwawasan dan profesional serta terjauh dari Nepotisme.

Fraksi PAN dengan juru bicara Drs.H.M.Syatar, HS

Fraksi PAN memberikan saran perlu personil yang profesional untuk mengisi SOTK, letakkan sesuatu pada tempatnya, dan pengesahan SOTK ini dapat membantu percepatan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Setelah seluruh fraksi setuju dilanjutkan dengan pembacaan persetujuan DPRD oleh Sekwan Nomor 02/KEP.D/DPRD/2008 tanggal 25

Februari 2008 dan dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD. Setelah penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan sambutan Bupati Padang Pariaman.

Semua saran, usul dan pendapat dari fraksi – fraksi akan menjadi perhatian bagi Eksekutif dalam menjalankan tugas – tugas nantinya. Kami akan menempatkan orang – orang pada posisi yang benar, punya etos kerja serta kemauan yang besar untuk memajukan daerah.³

4.3 Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Sebagai badan Legislatif daerah, DPRD mempunyai dasar dalam pembuatan kebijakan daerah yang diaktualisasikan dalam Peraturan Daerah yang merupakan perwujudan penyaluran aspirasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02KEP.D/DPRD/2006 telah mengatur hak inisiatif atau prakarsa DPRD dalam melakukan pengusulan Rancangan Peraturan Daerah atas usulan dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

³ Risalah Rapat tanggal 25 Februari 2009

Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 4.5 berikut :

TABEL 4.5
JUMLAH DAN ASAL USUL PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Tahun	Jumlah Perda	Eksekutif	Legislatif
1	2005	4	3	1
2	2006	13	13	0
3	2007	12	12	0
4	2008	10	10	0
5	2009	7	7	0
	Jumlah	46	45	1

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab Padang Pariaman

Dari tabel diatas terlihat bahwa, jumlah dan asal usul Peraturan Daerah dari tahun 2005 – 2009 yang berasal dari Legislatif (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman hanya 1 buah pada tahun 2005. Sedangkan sebanyak 45 perda berasal dari eksekutif.

1 (satu) buah Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Anggota DPRD adalah Perda Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota DPRD Iskandar Bustami mengatakan:

DPRD Kabupaten Padang Pariaman belum pernah menggunakan hak inisiatifnya disebabkan latar belakang pendidikan anggota DPRD yang berbeda-beda, sehingga mereka belum paham dengan urusan-urusan

pemerintahan. Namun bukan berarti pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tidak ada, karena dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Daerah memerlukan peran dari anggota DPRD. Penetapan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah harus berdasarkan Surat Keputusan DPRD.⁴

Sementara itu Ali Risa, SE mengatakan :

Dalam pembahasan Peraturan Daerah, DPRD dapat meminta penjelasan Pemerintah Daerah alasan Peraturan Daerah tersebut dibuat. Apabila rancangan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keadaan masyarakat yang berkembang di daerah itu maka DPRD berhak untuk memberikan pertimbangan sehingga diadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah bahkan menolak rancangan itu.⁵

4.2 Faktor-faktor Yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber hukum yang harus dipedomani oleh masyarakat.

Sesuai dengan urutannya maka Peraturan Daerah merupakan salah satu kebijakan daerah berupa peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.⁶

Dampak lain yang terjadi yaitu kebimbangan dari DPRD untuk memberlakukan suatu kebijakan atas peraturan baru, karena belum ada petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis dari peraturan yang dikeluarkan. Berdasarkan wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta pembicaraan dengan Ketua MUI Padang Pariaman Drs.H.Chairuddin dan pimpinan LSM ada beberapa faktor yang menghambat

⁴ Wawancara 27 September 2009

⁵ Wawancara 27 September 2009

⁶ UU No 10 Tahun 2004 tentang

penggunaan hak dan inisiatif atau prakarsa anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya inisiatif DPRD dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dapat dibedakan kedalam faktor eksternal dan faktor internal :

A. Faktor Eksternal

1. Desakan Oleh Partai Politik

Partai politik membentuk wadah organisasi yang bisa menyatukan orang – orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Karena itu partai politik kurang lebih dapat diartikan sebagai suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional, untuk melaksanakan program partainya.⁷

Jumlah partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2004 – 2009 sebanyak 11 buah. Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan informan, dari 11 partai politik tersebut belum ada yang mendesak kadernya yang duduk sebagai Anggota DPRD dalam menyusun suatu rancangan Peraturan Daerah.

⁷ Undang – undang no 02 tahun 2008 tentang Parpol

Menurut Asmadi selaku sekretaris umum DPC Partai Golkar Kabupaten

Padang Pariaman :

Setelah seseorang duduk menjadi anggota DPRD, Partai hanya memperhatikan kadernya melalui penyetoran keuangan dan pengawasan sikap. Belum pernah kami menekan anggota untuk merumuskan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Yohanes Wempi sebagai ketua DPP PKS Kabupaten Padang Pariaman :

Biasanya Partai Politik menekan anggotanya apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut menimbulkan riak – riak bagi masyarakat.

Menurut Drs Wisran Darwis dari PDI-P :

Sampai saat ini, kami dari PDI-P memang belum pernah memberikan ide ataupun masukan kepada Anggota kami yang duduk di DPRD dalam hal mengeluarkan ide suatu rancangan peraturan daerah.

Hal ini diperkuat dengan melihat dokumen yang ada di Sekretariat Partai Golkar, PPP, PDI-P, PAN dan PKS. Tidak ada surat keluar yang menyatakan penekanan kepada Anggota Partai untuk merumuskan rancangan Peraturan Daerah.

Partai politik belum pernah menekan anggotanya yang duduk di DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan belum adanya pemahaman yang jelas dari partai politik akan tugas dan tanggung jawabnya. Seharusnya partai politik memiliki peranan yang besar dalam mengontrol dan mengawasi anggotanya yang duduk di parlemen. Salah satunya meminta anggotanya memperkuat fungsi legislasi DPRD dengan

cara mengeluarkan ide dan inisiatif dalam penyusunan suatu rancangan peraturan daerah.

2. Kelompok – Kelompok Penekan

Adanya perubahan yang besar dari era Orde Baru ke Era Reformasi di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan masih adanya dominasi Eksekutif. Hal ini disebabkan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman merasa bahwa DPRD Kabupaten Padang Pariaman kurang menunjukkan aktivitasnya yang menyangkut kepentingan masyarakat. Padahal kinerja DPRD yang terlihat oleh masyarakat adalah bagaimana DPRD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman cukup banyak tekanan yang diberikan oleh publik baik berupa unjuk rasa, dengar pendapat maupun pertemuan – pertemuan informal. Selama periode 2004 – 2009, DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah menerima 23 kali unjuk rasa dan 31 kali dengar pendapat. Unjuk rasa dan dengar pendapat dilakukan oleh masyarakat kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Namun tidak semua unjuk rasa maupun dengar pendapat dimasukkan kedalam substansi Rancangan Peraturan Daerah.⁸

Diantara sekian banyak peraturan Daerah yang ditetapkan DPRD, penulis mengambil contoh 2 (dua) Peraturan Daerah yang ditekan oleh LSM kepada Eksekutif bukan kepada Legislatif.

⁸ Dokumen dan arsip Sekretariat DPRD

Drs.H.Chairuddin Ketua MUI Padang Pariaman mengatakan :

“Selama ini kami percaya terhadap DPRD yang menyampaikan aspirasi kami namun saya melihat belum ada DPRD yang menyampaikan inisiatif untuk mengusulkan Perda. Kami telah berusaha untuk menekan dan menyampaikan aspirasi ini, toh mereka tidak terlalu memperhatikan dan mengatakan bisa disalurkan melalui Pemda. Salah satu contoh Perda 03 Tahun 2007 tentang Baca Tulis Alqur'an. Usulan ini dibuat oleh Bagian Kesra SetdaKab Padang Pariaman melalui pembicaraan singkat kami kepada Bupati Padang Pariaman dan diteruskan kepada Kabag Kesra”

Senada dengan hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Nelayan Sungai Limau dan Batang Anai yang menginginkan adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut. Berikut Rangkumannya :

“Kami telah menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD wilayah pemilihan kami, namun tidak ada tanggapan. Bahkan kami telah melakukan demonstrasi ke DPRD, tapi akhirnya Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang merumuskan Perda tersebut. Akhirnya lahirlah Perda Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Padang Pariaman”

Terlihat bahwa tekanan yang diberikan oleh LSM ataupun kelompok tertentu kepada DPRD hanya mendapat respons sesaat. Akhirnya kelompok tersebut lebih menekan eksekutif untuk mengeluarkan inisiatif pembuatan Rancangan Peraturan Daerah. Namun ada juga rancangan Peraturan Daerah yang sudah ditekan oleh kelompok masyarakat , tidak mendapat perhatian dari DPRD adalah Perda 02 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

Demonstrasi yang dilaksanakan oleh ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Peduli Kabupaten Padang Pariaman terjadi pada tanggal 13 Mei 2008. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan membentangkan

spanduk menolak Rimbo Kalam Kecamatan Enam Lingkung dan menetapkan VII Koto Sungai Sariak sebagai Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang baru.⁹

Dengan adanya riak – riak dari sejumlah masyarakat yang mencoba untuk menggagalkan keputusan DPRD tersebut dan atas hasil dialog dan dengar pendapat bersama perwakilan masyarakat yang menggugat, maka DPRD kembali mengadakan rapat gabungan komisi dan eksekutif.¹⁰ Pada tanggal 26 Juni 2009 dilaksanakan sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi mengenai Ranperda pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2008 dalam sidang Paripurna DPRD dihasilkanlah suatu keputusan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.¹¹

Dari gambaran diatas, terlihat bahwa meskipun keputusan DPRD menuai protes dan ditentang secara terang – terangan oleh sejumlah masyarakat yang menggugat, akan tetapi tidak menjadi batu sandungan bagi anggota DPRD untuk menetapkan Perda 02 Tahun 2008.

Akibatnya, masyarakat lebih senang untuk menyampaikan aspirasinya kepada Eksekutif untuk membuat suatu rancangan Peraturan Daerah dibandingkan dengan legislatif. Sarley ketua Forum Komunikasi LSM Kabupaten Padang Pariaman mengatakan bahwa LSM lebih banyak menekan kepada Bupati untuk merumuskan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Nantinya Bupati akan menyuruh instansi terkait untuk membuat Ranperda dimaksud. Setelah nanti dibahas DPRD

⁹ Lih Singgalang Rabu 14 Mei 2009 hal 2

¹⁰ Naskah akademis pemindahan ibukota kabupaten

¹¹ Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab Padang Pariaman

kalau kita memang perlu dengar pendapat kita akan lakukan, namun biasanya tidak ada hambatan yang berarti.

3. Perumusan Ranperda lazim dilakukan oleh eksekutif

Selama masa-masa Orde Baru semua perumusan Raperda itu datang dari Eksekutif, sedangkan Legislatif tidak lain pekerjaannya hanya sebagai tukang stempel atau pemberi pengesahan setiap Raperda yang diajukan oleh Eksekutif. Sehingga membuat Eksekutif menjadi leluasa menuangkan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakannya. Sebaliknya menyebabkan kontraproduktif bagi Legislatif karena tidak melakukan apa-apa bahkan tidak mencoba untuk dapat memberikan masukan-masukan kebijakan dan cenderung menunggu inisiatif dari Eksekutif.

Eksekutif dalam merumuskan kebijakan berupaya agar semua kebijakan yang dirumuskan tidak menyulitkannya, karena hal-hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan sudah diteliti dan dipelajari dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu. Pendukung setiap merumuskan kebijakan telah terbentuk sehingga ada kesan spesialisasi. Kita ambil contoh perumusan rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, disini unit yang membidani dalam proses perumusan kebijakan Peraturan Daerah tersebut adalah Bagian Organisasi dan SKPD yang lain siap membantu jika kekurangan data

yang terkait dengan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah selalu diperhatikan oleh Eksekutif. Bagian Hukum adalah unit Eksekutif dalam menangani setiap persoalan teknis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah. Karena banyak referensi Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan pijakan untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah. Hasil wawancara baik itu kepada Kabag Hukum, Kabag Organisasi dan staf dapat disimpulkan bahwa mereka selalu berprinsip dan selalu mempedomani setiap Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang lebih atas atau Pusat. Dalam setiap ada perubahan Eksekutif selalu berkoordinasi dengan Propinsi maupun dengan Daerah lain di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berinisiatif untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini dikatakan oleh Kabag Hukum Sekretariat kabupaten Padang Pariaman :

Memang selama ini rancangan peraturan daerah didominasi oleh eksekutif karena tuntutan dari perkembangan perundang – undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Selain itu Bupati selalu mengingatkan SKPD yang ada apabila ada permintaan ataupun tekanan dari masyarakat Padang Pariaman.

Aturan atau tradisi seperti itu dibenarkan oleh beberapa Anggota DPRD yang diwawancarai. Yulius Danil dari Partai Golkar mengatakan :

Selama ini memang Eksekutif yang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah. Kedepan akan diusahakan rancangan Peraturan Daerah berasal dari Legislatif.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Andi Eljusra dari Partai Bulan Bintang (PBB), Drs Basnil dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan H Sudirman Nazar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pengalaman Eksekutif dalam perumusan Peraturan Daerah kemampuannya lebih berpengalaman dibanding dengan Legislatif. Oleh karena itu setiap rumusan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Eksekutif ke DPRD biasanya telah mendekati kesempurnaan. Pengalaman ini dikarenakan tugas-tugas rutin Eksekutif menyebabkan Eksekutif sangat menguasai kondisi lapangan dibandingkan Legislatif. Apalagi Eksekutif didukung oleh kemampuan dan tenaga ahli dibidangnya juga sarana yang memadai. Contoh dalam hal kontruksi pembuatan gedung, maka yang menguasai persoalan tentang yang berhubungan dengan gedung adalah Dinas Pekerjaan Umum. Mereka mampu menghitung, memperkirakan dan merencanakan yang dilakukannya sehingga kalau akan ada kebijakan yang kaitannya pembuatan gedung maka Eksekutif sudah siap dengan perangkatnya.

Ketiga faktor yang telah dijelaskan diatas yaitu desakan oleh partai politik, adanya kepentingan dari kelompok – kelompok penekan dan tradisi eksekutif dalam perumusan Ranperda tidak bekerja sendiri – sendiri. Namun saling memberikan ketergantungan. Hal tersebut menyebabkan lemahnya inisiatif Anggota DPRD dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah.

4. Persepsi Anggota Dewan

Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga legislatif daerah adalah penyusunan dan penetapan peraturan daerah. Idealnya DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai Rancangan Peraturan Daerah. Tetapi kenyataannya selama ini DPRD Kabupaten Padang Pariaman belum berperan sebagaimana yang diharapkan.

Inisiatif dan ide DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah sangat diharapkan karena lembaga ini merupakan perwakilan atau pilihan dari konstituennya. Menurut Dasril Yani Pasha dari Fraksi Golkar :

“Seharusnya, DPRD memang memiliki fungsi inisiatif ataupun ide dalam menyusun rancangan peraturan daerah, tapi kami baru satu kali mengusulkannya pada tahun 2005.”¹²

Pendapat senada disampaikan oleh Zulkifli Sabata dari Partai Amanat Nasional yang mengatakan :

“Kalau bicara ideal, DPRD harus lebih banyak berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah daripada eksekutif, namun saya kira hal inilah yang akan kita ubah untuk masa yang akan datang. Kami di legislatif akan berupaya lebih banyak berinisiatif untuk mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah.”

Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh anggota DPRD ke berbagai daerah memiliki banyak tujuan. Salah satunya yaitu melihat dan mempelajari peraturan daerah yang ada di daerah kunjungan tersebut. Ketika ditanya kepada

¹² Wawancara dengan Dasril Yani Pasha dari Fraksi Golkar

anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengenai hasil kunjungan kerja tersebut, Iskandar Bustami dari Fraksi PKS mengatakan :

“Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman ke berbagai daerah, salah satu tujuannya adalah mempelajari peraturan daerah yang ada di daerah tersebut. Biasanya kami mengajak dinas/instansi terkait yang akan mempelajari hal tersebut.”

Pendapat senada juga disampaikan oleh Andi Eljusra dari PBB :

“Dinas/instansi diikutsertakan dalam kunjungan kerja agar dapat mendampingi anggota DPRD di lapangan, selanjutnya instansi terkait tersebut membuat usulan rancangan peraturan daerah jika memang dibutuhkan oleh Kabupaten Padang Pariaman.”

Selain itu , dalam hal penetapan Peraturan Daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak lagi sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi atau pendapat diantara anggota Dewan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli Sabata Wakil Ketua DPRD diperoleh keterangan

Dalam pembahasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sering diwarnai perbedaan pendapat oleh anggota DPRD itu sendiri baik antar anggota fraksi maupun antar fraksi. Akibatnya penetapan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan jadwal semula. Bahkan diperlukan waktu satu bulan untuk menyamakan persepsi diantara sesama anggota Dewan.

Sekretaris Dewan menilai anggota Dewan hanya ingin menunjukkan kemampuan berbicara atau berdiplomasi sehingga sulit untuk menyamakan persepsi diantara mereka.

Pendapat di atas juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Beliau mengakui sering terjadi perdebatan antar anggota Dewan. Hal ini memicu terjadinya konflik.

Salah satu proses penetapan Peraturan Daerah yang mengalami perdebatan yang cukup alot adalah Perda Nomor 03 Tahun 2007 tentang Kewajiban Pandai Membaca Alqur'an bagi Murid SD, SMP, SMA dan Calon Pengantin.

Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Bagian Kesra SetdaKab Padang Pariaman melalui Surat Bupati Nomor : 460/034/Kesra-2006 yang menyatakan bahwa Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib membuktikan kemampuan pandai membaca Alqur'an dengan baik dan benar dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dihadapan P3N.

Pada Pembicaraan Tahap II yaitu pemandangan umum dalam rapat paripurna untuk mendengarkan tanggapan dari anggota yang membawakan suara Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut yang memiliki perbedaan yang mendasar yaitu Fraksi PKS dan Fraksi PDI - P yang membuat dua blok atau kubu yang bertentangan di DPRD. Fraksi PKS yang didukung oleh Fraksi PBB , PPP dan Golkar mendukung untuk disahkan Perda No 3 Tahun 2007 ini secara utuh. Namun Fraksi PDI – P yang diikuti Fraksi PAN dan Madani mendukung Perda tersebut namun hanya untuk murid SD, SMP dan SMA bukan untuk calon pengantin.

1. Darlis Kayo dari partai PDI - P

“Sangat sulit untuk menetapkan standar kemampuan pandai membaca Alqur'an yang diperuntukkan bagi calon pengantin. Tidak sama dengan kemampuan

pandai membaca Alqur'an bagi murid SD, SMP, dan SMA. Kami kira hal inilah yang perlu didudukkan terlebih dahulu. Selain itu dalam ranperda ini dikatakan bahwa apabila calon pengantin belum mempunyai kemampuan untuk membaca Alqur'an maka kepada calon Pengantin diperintahkan untuk belajar membaca Alqur'an sampai batas waktu tanggal pernikahan. Nah, apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon pengantin ini belum sanggup, maka pernikahan bisa batal. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami. Masyarakat bisa mencap Pemda menghalangi hak seseorang untuk menikah.

2. Iskandar Bustami dari PKS

"Kami sangat mendukung program pemerintah daerah dalam penetapan Perda Baca Tulis Alqur'an sehingga anak kemenakan kita kelak dikemudian hari betul – betul memahami isi Alqur'an"

Akhirnya setelah melalui perdebatan yang cukup alot yang memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan disepakati bahwa bagi calon pengantin yang tidak mampu membaca Alqur'an sampai waktu pernikahan, pelaksanaan nikah calon pengantin dapat dilaksanakan tapi buku nikah belum dapat diserahkan. Penyerahan buku nikah akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah dapat membaca Alqur'an dengan baik dan benar.

Penyamaan persepsi antar anggota DPRD dapat dilakukan dengan kesadaran yang tinggi dari anggota dewan akan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan lobi – lobi politik antar fraksi maupun antar partai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulius Danil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dapat dilihat bahwa peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari asal-usul rancangan Peraturan Daerah yang ada masih dominan berasal dari pihak eksekutif daerah. Peranan DPRD Kabupaten Padang Pariaman hanya terlihat pada tingkat pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah.

Ketidakberdayaan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pelaksanaan hak prakarsa atau inisiatif dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah selama ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain faktor eksternal yaitu tidak adanya desakan dari partai politik kepada anggotanya yang duduk di parlemen dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah, kelompok – kelompok penekan seperti MUI, Forum Nelayan dan LSM yang lebih banyak menekan eksekutif daripada legislatif melalui Unjuk rasa, perumusan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh eksekutif serta faktor internal yaitu persepsi anggota dewan mengenai peran DPRD dalam berinisiatif menyusun rancangan peraturan daerah.

5.2 Saran

Setelah meneliti dan menganalisis peranan DPRD dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk lebih meningkatkan peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasinya maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini :

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengerti dan paham akan tugas dan fungsinya sebagai Badan Legislatif Daerah yang membawa amanat rakyat sehingga mereka harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggota DPRD harus mengerti dan paham akan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Padang Pariaman secara umum sehingga rakyat benar-benar merasa terwakili. Anggota DPRD berdialog langsung dengan konstituennya ketika reses.
2. Anggota DPRD tidak menjadikan faktor-faktor penyebab sebagai pokok permasalahan sehingga peran DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Partai politik, dan kelompok penekan harus benar – benar dapat menjadi kontrol dan pengawasan bagi Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan cara memperkuat rekrutmen caleg, dialog dengan anggota DPRD tentang adanya inisiatif anggota menyampaikan ide dan gagasan dalam sidang paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Faried. 1996. **"Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia"**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amiroedin, Syarif. 1987. **"Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya"**. Bina Aksara. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. **"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"**. Rineka Cipta. Jakarta
- Brod, Harry. 1992. **"Hegel's philosophy of politics-idealism, identity and modernity west view press-boulders"**. San Fransisco and Oxford. USA
- Budiarjo, Miriam. 2001. **"Dasar-dasar Ilmu Politik"**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Carter, Gwendolen.M and Herz, Jhon H. 1965. **"Government and Politics In The Twentieth Century"**. Newyork
- Farida Indrati, Maria. 2007. **Ilmu Perundang – undangan I**. Kanisius. Yogyakarta
- Farida Indrati, Maria. 2007. **Ilmu Perundang – undangan II**. Kanisius. Yogyakarta
- Fatwa, AM. 2004. **Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Imawan, Riswandha. 2001. **Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta.
- Internasional Commission of Jurist. 1965. **"The Dynamic Aspect of The Rule of Law In The Modern Age. Report on The Proceeding of The South-East Asian and Pacific Conference Of Jurist"**. Bangkok. February 15-19
- Kaho, Josef Riwu. 1997. **"Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia"**. PT Raja Grafindo. Jakarta

- Kelsen, Hans. 1973. **"General Theory of Law and State"**. Rusel and Russel, Newyork
- Lubis, M.Solly. 1995. **"Landasan dan Teknik Perundang-undangan"**. Mandar Maju, Bandung
- Manan, Bagir. 1992. **"Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia"**. Ind.Hill.Co, Jakarta
- _____. 1993. **"Sistem Perundang-undangan Indonesia"**. BHPN Departemen Kehakiman. Jakarta
- Marbun, BN. 1998. **"DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya"**, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mayo, H B. 1960. **"An Introduction to Democratic Theory"**. Oxford University Press. Newyork
- Modeong, Supardan. 2001. **"Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah"**. PT Tinta Mas Indonesia. Jakarta
- _____. 2003. **"Teknik Perundang-Undangan di Indonesia"**. PT Perca. Jakarta
- Moleong, Lexy. J, 2002. **"metode penelitian kualitatif"**. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nazir, Moh. 1999. **"Metode Penelitian"**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Poerwadarminta, WJS. 1991. **"Kamus Umum Bahasa Indonesia"**. Balai Pustaka. Jakarta
- Prakoso, Joko. 1985. **"Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya"**. Galia Indonesia, Jakarta
- Rosyidi, Ranggawijaya. 1998. **"Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia"**. CV Mandar Maju. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1987. **"Sosiologi Suatu Pengantar"**. Rajawali Pers. Jakarta
- Sugiyono, 2002. **"Metode Penelitian Administrasi"**. Alfa Beta. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. **"Sistem Politik Indonesia"**. PT Refika Aditama. Bandung

- Syafrudin, Ateng. 1993. **"Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah"**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Terry, GR, 1991. **"Prinsip-Prinsip Manajemen"**. Radar Jaya Offset. Jakarta
- Wasistiono, Sadu. 2002. **"Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"**. Alqaprint Jatinangor. Bandung
- _____, Ondo Riyani. 2001. **"Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah"**. Alqaprint Jatinangor. Bandung

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang **Pemerintahan Daerah**
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang **Partai Politik**
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang **Pemilihan Umum**
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang **Susunan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD**
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang **Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintahan Daerah**
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**
- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang **Partai Politik**
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang **Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
- Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22/KPTS/DPRD-PP/2004 Tentang **Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2004
PER DAERAH PEMILIHAN DAN ORGANISASI PESERTA PEMILU**

No	Nama Partai Politik	Daerah I	Daerah II	Daerah III	Daerah IV	Total suara
1	PNI Marhaenisme	1.238	-	70	171	1.479
2	PBSD	-	331	-	196	527
3	PBB	2.269	1.798	2.169	2.620	9.513
4	Partai Merdeka	1.189	489	675	408	2.761
5	PPP	3.918	5.026	6.260	5.457	20.661
6	PPDK	108	442	469	502	1.521
7	PPIB	488	152	1.181	145	1.966
8	PNBK	492	357	99	325	1.273
9	Partai Demokrat	731	1.383	2.312	3.251	7.677
10	PKPI	909	399	267	1.588	3.163
11	PPDI	-	-	192	226	418
12	PPNUI	125	1.373	235	233	1.966
13	PAN	5.188	3.260	6.424	3459	18.331
14	PKPB	326	955	685	724	2.690
15	PKB	406	1.027	1.267	953	3.653
16	PKS	1.229	5.933	3.581	4.168	14.911
17	PBR	461	1.421	818	1.423	4.123
18	PDIP	971	1.958	2.733	1.607	7.269
19	PDS	-	-	-	115	115
20	Partai Golkar	8.140	9.286	11.337	9.591	38.354
21	Patriot Pancasila	-	226	151	-	377
22	PSI	2.264	1.046	1.809	786	5.905
23	PPD	531	1.334	749	1.415	4.029
24	Partai Pelopor	751	246	96	233	1.326
	JUMLAH	32.391	38.442	43.579	39.596	154.008

Sumber : KPU Kabupaten Padang Pariaman, 2004

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN PERTAMA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

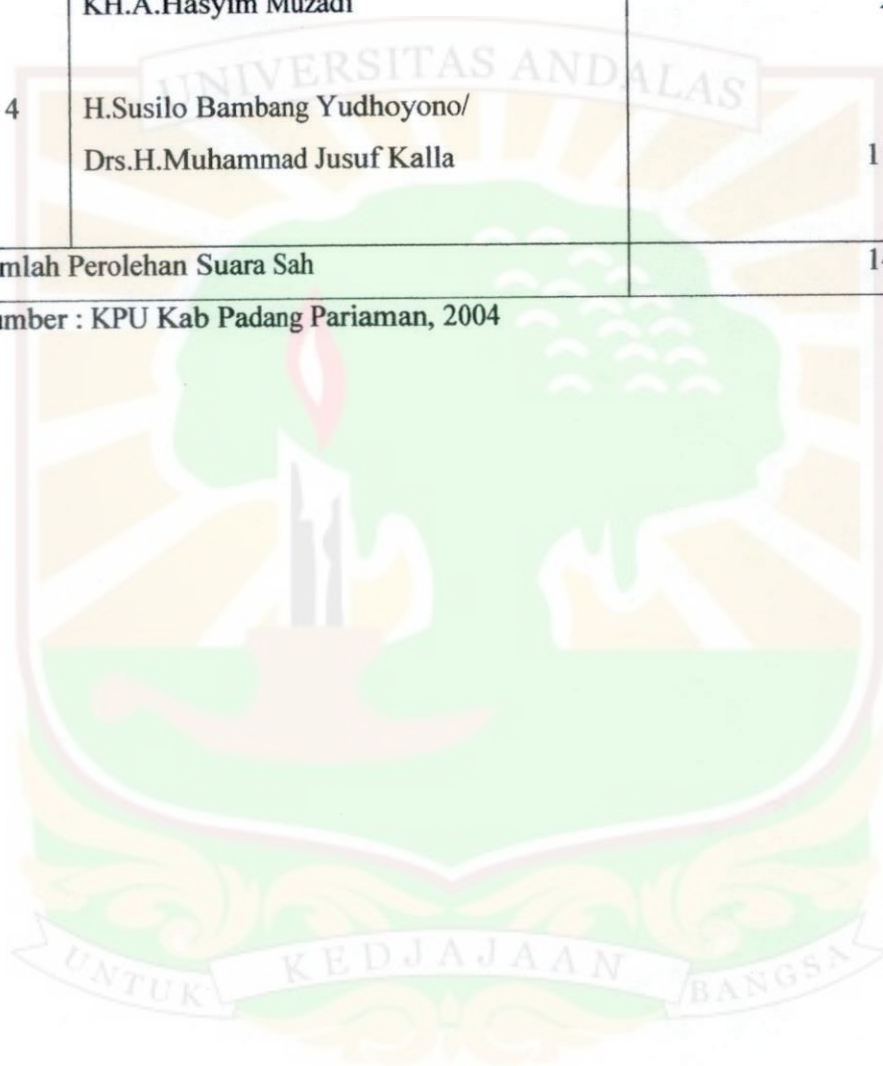
No Urut	Nama Pasangan Calon Presiden / Wakil Presiden	Jumlah Suara
1.	H. Wiranto,SH / Ir.H.Salahuddin Wahid	49.664
2.	Hj.Megawati Soekarnoputri/ KH.A.Hasyim Muzadi	10.771
3.	Prof.Dr.H.M Amien Rais/ Dr.Ir.H.Siswono Yudo Husodo	48.084
4.	H.Susilo Bambang Yudhoyono/ Drs.H Muhammad Jusuf Kalla	38.707
5.	Dr.H.Hamzah Haz/ H.Agum Gumelar.M.Sc	5.935
Jumlah Perolehan Suara Sah		153.101

Sumber : KPU Kab Padang Pariaman,2004

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN	JUMLAH SUARA
2	Hj.Megawati Soekarno Putri/ KH.A.Hasyim Muzadi	29.906
4	H.Susilo Bambang Yudhoyono/ Drs.H.Muhammad Jusuf Kalla	114.961
Jumlah Perolehan Suara Sah		144.867

Sumber : KPU Kab Padang Pariaman, 2004



**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2004-2009**

No	Nama	Jabatan	Utusan	kelamin
1	Yulius Danil	Ketua	Golkar	
2	Drs Akhiardi	Wakil Ketua	PAN	
3	Zulkifli Sabata	Wakil Ketua	PPP	
4	Dasril Yani Pasha	Anggota	Golkar	
5	Abuzar Yahya	Anggota	Golkar	
6	Dedi Edwar, SE	Anggota	Golkar	
7	Asmadi	Anggota	Golkar	
8	Saamar Tk Sidi	Anggota	Golkar	
9	Ir Indra Yudha,MM,MBA	Anggota	Golkar	
10	Alirisa, SE	Anggota	PPP	
11	A.S Edi	Anggota	GOLKAR	Laki-laki
12	Drs.M.Syatar.HS	Anggota	PAN	Laki-laki
13	Hafrizal,B.Sc	Anggota	PAN	Laki-laki
14	Darmon,S.Ag,MM	Anggota	PAN	Laki-laki
15	Yardi,S.Ag	Anggota	PKS	Laki-laki
16	Ramli,S.Sos	Anggota	PKS	Laki-laki
17	Drs.Basnil	Anggota	PKS	Laki-laki
18	Iskandar Bustami	Anggota	PKS	Laki-laki
19	Halim Chan	Anggota	PPP	Laki-laki
20	Hendri Gusvira,ST	Anggota	GOLKAR	Laki-laki
21	Yurli	Anggota	PPP	Laki-laki
22	H.Sudirman Nazar	Anggota	PPP	Laki-laki
23	Andi Eljusra,BC	Anggota	PBB	Laki-laki
24	Zuhelma,S.Ag	Anggota	PBB	Perempuan
25	Drs.H.Chairudin	Anggota	PBB	Laki-laki
26	Komi Chaniago	Anggota	PBB	Laki-laki
27	Hendri	Anggota	PDIP	Laki-laki
28	Drs.Wirsan Darwis	Anggota	PDIP	Laki-laki
29	Darlis Kayo	Anggota	PDIP	Laki-laki
30	Devy Novia,A.Md	Anggota	DEMOKRAT	Perempuan
31	Eri Zulfian,S.Pt	Anggota	DEMOKRAT	Laki-laki
32	Dasmar	Anggota	PNI MARHAENIS	Laki-laki
33	Happy Neldi,SE	Anggota	PKPI	Laki-laki
34	Amrizal Tanjung	Anggota	PBR	Laki-laki
35	H.Mantri Muslim	Anggota	PSI	Laki-laki

Sumber : sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman,2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2004-2009**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Yulius Danil	Ketua
2	Drs.Akhiardi	Wakil Ketua
3	Zulkifli Sabata	Wakil Ketua
4	Taslim, SH,MM	Sekretaris bkn anggota
5	Saamar Tk Sidi	Anggota
6	Abuzar Yahya	Anggota
7	As Edi	Anggota
8	Drs.H.M.Syatar, HS	Anggota
9	Halim Chan	Anggota
10	Drs. Basnil	Anggota
11	Drs.H.Chairuddin	Anggota
12	Drs.H.Wisran Darwis	Anggota
13	H.Mantari Muslim	Anggota
14	Amrizal Tanjung	Anggota
15	Devi Novia, A.Md	Anggota
16	Hendri	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman,2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN
DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2004-2009**

No	Nama	Jabatan
1	Yulius Danil	Ketua
2	Drs.Akhiardi	Wakil Ketua
3	Zulkifli Sabata	Wakil Ketua
4	H.Taslim, SH,MM	Sekretaris bkn anggota
5	Dasri Yani Pasha	Anggota
6	Asmadi	Anggota
7	Dedy Edwar, SE	Anggota
8	Hendri Gusvira, ST	Anggota
9	Alirisa, SE	Anggota
10	Hafrizal, B.Sc	Anggota
11	Darmon, S.Ag,MM	Anggota
12	Yurli	Anggota
13	H. SudirmanNazar	Anggota
14	Yardi, S.Ag	Anggota
15	Ramli, S.Sos	Anggota
16	Komi Chaniago	Anggota
17	Andi Eljusra	Anggota
18	Zulhelma, S.Ag	Anggota
19	Dasmar	Anggota
20	Happy Neldi,SE	Anggota
21	Darlis Kayo	Anggota
22	Eri Zulfian, S.Pt	Anggota
23	Iskandar Bustami	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman,2008